

**EFEKTIVITAS SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NO. KPTS. 312/XI/1982 TERHADAP LARANGAN MENDIRIKAN BANGUNAN DI
AREAL PENCADANGAN TANAH BANDARA SULTAN SYARIF KASIM II KOTA
PEKANBARU DITINJAU MENURUT
FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)**



OLEH

HENDRI
NIM : 10424025099

**PROGRAM S1
JURUSAN JINAYAH SIYASAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASpIM
RIA
2011**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Efektivitas Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 Terhadap Larangan Mendirikan Bangunan di Areal Pencadangan Tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru ditinjau menurut fiqh siyasah”, ditulis dengan latar belakang bahwa rendahnya ketidaktaatan atau ketidakpatuhan masyarakat terhadap SK KDH TK I Riau No. KPTS.312/XI/1982 yang salah satu isinya melarang mendirikan bangunan di dalam lokasi perluasan bandara Sultan Syarif Kasim II.

Efektivitas terhadap larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru berdasarkan SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982 diketahui tidak berjalan sebagaimana ditetapkan. Masih banyak pelanggaran terhadap larangan tersebut hal ini disebabkan karena tidak ada kejelasan kapan proses pembebasan lahan akan dilaksanakan dan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah mengenai keberadaan SK tersebut. Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.312/XI/1982 dilihat dari kacamata syariat dapat diterima karena diterbitkan dalam rangka membangun fasilitas yang tujuannya adalah kemaslahatan rakyat. Akan tetapi, larangan mendirikan bangunan semenjak terbitnya SK Gubernur Riau No. KPTS.312/XI/1982 yang sampai saat ini sudah 28 tahun lamanya tidak ada kejelasan atau kepastian untuk dilaksanakan proses pembebasan lahan. Ketidakpastian ini, akhirnya membuat pelaksanaan larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru tidak dapat berjalan. Akibat dari ketidakpastian tersebut juga berdampak dengan banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi SK Gubernur Riau No. KPTS.312/XI/1982. Ketidakpastian juga melanggar rasa keadilan bagi masyarakat, di mana hal seperti ini dalam sistem pemerintah Islam tidak dibenarkan. Karena menurut Islam, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan rakyat dan harus berbuat adil tetap melaksanakan hukum-hukum syari’at dan harus mengikuti hukum-hukum itu dalam segala tindak-tanduknya serta memelihara amanah dan janji.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	I
NOTA PEMBIMBING.....	Ii
KATA PENGANTAR.....	Iii
DAFTAR ISI.....	Vi
DAFTAR TABEL.....	Viii
ABSTRAK.....	Ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	17
A. Letak Georafis Kecamatan Marpoyan Damai.....	17
B. Profil Kecamatan Marpoyan Damai.....	18
C. Keadaan Penduduk.....	22
BAB III TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Terhadap SK Gubernur Riau No KPTS. 312/XI/1982.....	26
B. Kewenangan Negara dalam Masalah Tanah.....	30
C. Ajaran Tentang Pola Hubungan Rakyat dan Penguasa Menurut Islam.....	45
BAB IV PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU NO. KPTS 312/XI/1982	53
A. Pelaksanaan SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982.....	53
B. Kendala Pelaksanaan SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982	62
C. Analisa efektif SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982.....	73
D. Pandangan Figh Siyasah SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982.....	
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
Kesimpulan.....	83
Saran.....	85
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	87
LAMPIRAN.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Pekanbaru se-abad yang lalu hanya merupakan suatu daerah kecil yang terletak dipinggir Sungai Siak, karena memiliki potensi strategis bagi kegiatan perdagangan dan jasa telah mendorong percepatan pembangunan daerah ini.¹ Perkembangan Kota Pekanbaru, menunjukkan ciri kota yang akan terus berkembang yaitu penduduknya yang makin bertambah dan makin padat, bangunan-bangunannya yang semakin rapat dan wilayah terbangun terutama pemukiman yang cenderung semakin luas, serta semakin lengkapnya fasilitas kota yang mendukung kegiatan sosial dan ekonomi kota”.²

Peningkatan jumlah penduduk diikuti pula dengan munculnya pemukiman-pemukiman baru, termasuk bangunan-bangunan disektor perdagangan dan jasa, seperti bangunan hotel, pertokoan, pusat-pusat perbelanjaan, gudang dan lain-lain sebagainya. Berkaitan dengan lajunya pembangunan tersebut, maka sektor tata ruang dan bangunan adalah salah satu andalan Kota Pekanbaru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pungutan retribusi dari pelayanan Izin Mendirikan Bangunan. Hal tersebut untuk setiap tahun selalu ditargetkan meningkat sebagaimana pada tahun 2007 ditargetkan Rp 10 milyar, tahun 2008 Rp 12 milyar sedangkan pada tahun 2009 ditargetkan sebanyak Rp 14 milyar.

Dasar hukum dalam memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2000 tentang Izin

¹Yalid, *Peranan Perencana Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Izin Bangunan dalam Daerah Kota Pekanbaru*, Skripsi, (Pekanbaru : Universitas Lancang Kuning, 2003), h. 3.

²*Ibid.*

Bangunan dalam Daerah Kota Pekanbaru, didalamnya terdapat ketentuan yang secara eksplisit memberi kewenangan kepada Walikota Pekanbaru untuk menetapkan kebijakan-kebijakan.

Kewenangan yang dimaksudkan itu dapat diketahui dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 huruf b Perda Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2000, ketentuan tersebut memberikan *“Walikota kewenangan untuk menetapkan kebijaksanaan terhadap lingkungan khusus atau lingkungan yang dikhususkan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah ini dengan mempertimbangkan keserasian lingkungan dan atau keamanan negara”*.

Berdasarkan ketentuan di atas, secara ekspilisit memberikan kewenangan Walikota Pekanbaru untuk menetapkan kebijakan administrasi sejalan dengan makna *freies ermessen* yang dikenal dalam ilmu administrasi negara. Kewenangan yang diatur dalam Pasal 2 huruf b di atas, menyebutkan adanya lingkungan khusus atau lingkungan yang dikhususkan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perda Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2000. Bila dicermati secara seksama di dalam Perda Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2000, tidak ditemukan satu pasal pun yang mengatur kawasan khusus tersebut. Kenyataannya di Kota Pekanbaru memang terdapat kawasan yang dikhususkan, satu di antaranya adalah kawasan Bandar Udara (Bandara) Sultan Syarif Kasim II. Di samping itu, masih ada beberapa kawasan khusus lainnya seperti Kawasan Industri Tenayan, Kawasan Terminal Payung Sekaki, Kawasan Wisata Danau Buatan dan lain-lainnya.

Ketentuan yang menjadikan kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II diberlakukan secara khusus memang tidak ditemukan pada Perda Kota Pekanbaru No. 14 tahun 2000. Tetapi pada ketentuan lain yakni Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (KDH TK I Riau) No. KPTS. 312/XI/1982 tentang Pencadangan Areal Tanah di Kelurahan Simpang Tiga dan Sidomulyo Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten TK II Kampar

untuk Lokasi Pengembangan Pangkalan Udara Pekanbaru, dengan serta merta menjadikan Bandara Sultan Syarif Kasim II diberlakukan menjadi kawasan khusus.

Pemberlakuan secara khusus tersebut adalah berkaitan dengan pencadangan areal di sekitar Bandara yang berdasarkan SK KDH TK I Riau No. KPTS.312/XI/1982 pada diktum kedua yang berbunyi “Bahwa persil-persil tanah garapan yang terdapat dalam areal tanah tersebut tidak dibenarkan dipindahtangankan, didirikan bangunan dan ditanami dengan sesuatu jenis tanaman, tanpa sepengetahuan dan seizin Camat dan Kelurahan setempat”.

Memperhatikan ketentuan di atas, terdapat perintah kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar dari Gubernur KDH TK I Riau agar melakukan pengamanan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam SK KDH TK I Riau No. KPTS.312/XI/1982. Oleh karena itu, dengan diterbitkan SK KDH TK I Riau No. KPTS.312/XI/1982, praktis tidak dibenarkan mendirikan bangunan yang terletak di areal pencadangan perluasan bandara bahkan terhadap tanahnya tidak dibenarkan dipindahtangankan, ditanami dengan sesuatu jenis tanaman, tanpa sepengetahuan dan seizin camat dan kelurahan setempat.

Namun, dalam perkembangannya lokasi yang dahulunya merupakan wilayah Tingkat II Kampar sebagaimana dimaksudkan SK KDH TK I Riau No. KPTS.312/XI/1982, saat ini telah menjadi wilayah dari Kota Pekanbaru. Berkaitan dengan SK KDH TK I Riau tersebut, Walikota Pekanbaru melalui suratnya No. 148/PKT-Sebrt/IX/2001, tertanggal 18 April 2001 memerintahkan kepada camat yang wilayah kerjanya meliputi lokasi yang dimaksud, yakni Camat Tampan dan Bukit Raya untuk tidak melayani/memproses surat menyurat menyangkut masalah tanah, antara lain seperti dipindahtangankan, didirikan bangunan dan lainnya di lokasi tersebut.

Sejak tahun 2003 dua kecamatan di atas mengalami pemekaran berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir. Dengan demikian muncul beberapa kecamatan baru diantaranya Kecamatan Tampan dan Bukit Raya sebagai kecamatan induk dan Kecamatan Marpoyan Damai, Payung Sekaki dan Tenayan Raya sebagai kecamatan hasil pemekaran.

Keadaannya sekarang khususnya setelah terjadi pemekaran daerah yang dimaksud dalam SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 merupakan wilayah dari kecamatan Marpoyan Damai, sehingga penyebutan untuk wilayah yang dimaksud dalam SK tersebut dalam pembahasan selanjutnya secara *mutatis mutandis* (berlaku sama) disebut dengan kecamatan Marpoyan Damai.

Berkaitan dengan lajunya pembangunan pemukiman baru masyarakat di Kota Pekanbaru tersebut, khususnya yang mengarah ke lokasi di sekitar kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II juga menunjukkan perkembangannya. Bahkan fenomena yang terjadi adalah sudah banyak pemukiman masyarakat yang didirikan berada dalam areal pencadangan perluasan bandara tersebut. Secara kasat mata hal tersebut dapat diperhatikan di sepanjang jalan Kartama, Jalan Pahlawan Kerja, di sisi kiri Jalan Arifin Ahmad, bahkan di Jalan Adisucipto yang berada paling dekat dengan lokasi bandara.

Memperhatikan banyaknya pemukiman masyarakat yang didirikan di dalam areal pencadangan perluasan bandara tersebut, menunjukkan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap SK KDH TK I Riau No. KPTS.312/XI/1982³. Padahal Islam mengajarkan agar

³Peta Areal Sekitar Bandara Sultan Syarif II Pekanbaru sebagaimana terlampir dalam SK KDH TK I Riau Nomor KPTS.312/XI/1982.

untuk mentaati pemerintah sepanjang bukan merupakan perbuatan maksiat. Sebagaimana Firman Allah Swt:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁴

Memperjelas mengenai ketaatan yang dimaksud, Rasulullah memberikan petunjuknya sebagai berikut:

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره الا ان يؤمر
بمعصية فان امر بمعصية فلا السمع ولا طاعة

Artinya : “Terhadap seorang Muslim hendaknya ia mau mendengarkan dan pada pimpinan, baik ia suka atau tidak suka. Kecuali jika pimpinan itu memerintahkan suatu maksiat, maka jika maksiat itu diperintahkan olehnya maka janganlah didengarkan dan tidak perlu ditaati”.⁵

Selanjutnya, dalam Hadist yang lain :

انس رضي الله عنه قال: رسول الله صلعم: اسمعوا واطيعوا,
وانستمعل عليكم عبد حبشي كان رءسه زبيبة ()

Artinya : Dari Anas r.a. berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Dengarkanlah dan taatilah olehmu meskipun yang menguasai kamu adalah seorang budak Habasyi (Ethiopia) yang bentuk kepalanya seperti biji kurma”.⁶

⁴Q.S. An Nisa 2 : 59.

⁵H.R. Muslim, dalam Husien Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadist Shahih Muslim*, (Surabaya : Al Ikhlas, 1984), Cet. ke-2, h. 248.

⁶H. R. Bukhari dalam Rafi'udin, *Hadist-hadist Pilihan*, (Jakarta : PT. Bina Utama, 2001), Cet. ke-1, h. 43.

Berdasarkan Firman Allah SWT, dan Hadist Nabi Muhammad, Saw di atas, jelaslah bahwa diperintahkan agar mentaati atau mematuhi pemerintah sepanjang bukan merupakan perbuatan maksiat.

Rendahnya ketidaktaatan atau ketidakpatuhan masyarakat terhadap SK KDH TK I Riau No. KPTS.312/XI/1982, dampaknya jelas tidaklah sederhana karena menyangkut keselamatan masyarakat itu sendiri. Kecelakaan pesawat dapat terjadi kapan saja, seperti gagal mendarat maupun gagal lepas landas, tentu daerah yang paling dekat dengan bandara akan lebih besar peluangnya ditabrak pesawat yang mengalami kecelakaan.

Secara *das sollen* pelanggaran terhadap SK KDH TK I Riau No. KPTS.312/XI/1982 seharusnya tidak boleh terjadi, karena ketentuan SK Gubernur Riau tersebut belum diubah atau dicabut hingga saat ini, bahkan Walikota Pekanbaru pada tahun 2001 menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat No. 148/PKT-Sebrt/IX/2001.

Berdasarkan keadaan di atas, menurut penulis merupakan suatu fenomena yang menarik untuk diteliti secara ilmiah khususnya dalam bentuk skripsi dengan judul “Efektivitas Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 Terhadap Larangan Mendirikan Bangunan di Areal Pencadangan Tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru ditinjau Menurut Fiqh Siyasah”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat terarah dengan baik dan terfokus pada masalah yang diangkat, maka penulis membatasi masalah yang diteliti pada efektivitas Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 terhadap larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah bandara Sultan Syarif Kasim II kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan SK Gubernur Riau No.KPTS 312/XI/1982 terhadap larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru?
2. Apa kendala pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 terhadap larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah bandara Sultan Syarif Kasim II kota Pekanbaru?
3. Bagaimana pandangan figh siyasah dihubungkan dengan pelaksanaan larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru berdasarkan SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 terhadap larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 terhadap larangan mendirikan bangunan diareal pencadangan tanah bandara.
- c. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah dihubungkan dengan pelaksanaan SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 terhadap larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- a. untuk menyelesaikan studi di fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau guna memperoleh gelar sarjana Hukum Islam (S.HI).
- b. Prespektif akademis, menerapkan dan mengembangkan disiplin ilmu yang diperoleh sekaligus mengaplikasikannya ke dalam penelitian ini.
- c. Prespektif praktis, jika dianggap layak dapat dijadikan bahan masukan serta referensi bagi Pemerintah Kota Pekanbaru mengenai respon masyarakat mengenai pelaksanaan SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982.
- d. Memberikan sumbangan terhadap khazanah ilmu pengetahuan umumnya dan ilmu siyasah khususnya.

E. Metode Penelitian

Guna mendapatkan hasil yang objektif dan maksimal maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru

tepatnya di Kecamatan Marpoyan Damai Kelurahan Maharatu. Pertimbangan penulis menjatuhkan pilihan terhadap lokasi ini berkaitan dengan fenomena banyaknya pemukiman masyarakat yang didirikan berada dalam areal pencadangan perluasan bandara tersebut, yang menunjukkan suatu pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982. Adanya masalah tersebut menarik penulis untuk

meneliti lebih lanjut sekaligus menjadikan lokasi ini sebagai lokasi yang menarik untuk diteliti.

2. Subjek dan objek penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengawasan dan Kepala Bidang Bangunan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, Camat Marpoyan Damai, Lurah Maharatu, Ketua RW dan Ketua RT di Kelurahan Maharatu serta masyarakat yang telah mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II.
- b. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan terhadap larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982.

3. Populasi dan sampel penelitian

Populasi dari penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengawasan dan Kepala Bidang Bangunan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, Camat Marpoyan Damai, Lurah Maharatu, Ketua RW dan Ketua RT di Kelurahan Maharatu serta masyarakat yang telah mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II. Dari populasi di atas khususnya Kepala Bidang Pengawasan dan Kepala Bidang Bangunan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, Camat Marpoyan Damai dan Lurah Maharatu masing-masing jumlahnya adalah satu orang, maka secara sensus keseluruhannya ditetapkan menjadi sampel. Kemudian Ketua RW di Kelurahan Maharatau ada sebanyak 19 orang, maka secara *random sampling* (acak) hanya 47 % (9 orang) yang dijadikan sampel. Sedangkan Ketua RT di Kelurahan Maharatu ada sebanyak 75 orang, maka secara *random sampling* (acak) hanya 10 % (8 orang) yang dijadikan

sampel. Terakhir masyarakat yang telah mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II jumlahnya cukup banyak, sebagaimana informasi dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru jumlahnya diperkirakan ± 500 bangunan. Mengingat banyaknya masyarakat yang telah mendirikan bangunan di areal tersebut, secara *random sampling* (acak) hanya 10 % (50 orang) dijadikan sampel. Selanjutnya, untuk memperjelas keadaan populasi dan sampel di atas dapat dilihat pada tabel I.I di bawah ini :

Tabel I. 1
Keadaan Populasi dan Sampel

No.	Populasi	Jumlah Populasi	Sampel	Persentase (%)
1.	Kepala Bidang Bangunan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru	1	1	100
2.	Kepala Bidang Pengawasan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru	1	1	100
3.	Camat Marpoyan Damai	1	1	100
4.	Lurah Maharatu	1	1	100
7.	Ketua RW/RT dan masyarakat yang telah mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II.	594	67	10
	Jumlah	598	71	11,87

Sumber : data primer diolah tahun 2010.

4. Sumber data

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sampel yang diteliti yakni Kepala Bidang Pengawasan dan Kepala Bidang Bangunan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, Camat Marpoyan Damai, Lurah Maharatu, Ketua RW dan Ketua RT di Kelurahan Maharatu serta masyarakat yang telah mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II.

b. Data sekunder

Data ini bukan diperoleh secara langsung kepada sumbernya, melainkan peran aktif penulis untuk melakukan studi kepustakaan atau studi dokumenter terhadap sumber-sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Metode pengumpulan data

a. Kuisisioner

Kuisisioner ini ditujukan pada Ketua RW dan Ketua RT di Kelurahan Maharatu serta masyarakat yang telah mendirikan bangunan di areal tersebut dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, daftar pertanyaan telah disediakan jawaban-jawabannya (kuisisioner tertutup).

b. Wawancara

Teknik wawancara yang penulis pergunakan adalah wawancara terstruktur yaitu proses tanya jawab antara penulis dengan sampel/responden yang diteliti, namun terikat dengan daftar pertanyaan telah penulis siapkan sesuai dengan arah permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara ini ditujukan pada Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Camat Marpoyan Damai, dan Lurah Maharatu.

c. Observasi

Metode ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun secara langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan memperhatikan keadaan di lapang

d. Studi dokumen

Metode pengumpulan data ini dilakukan melalui peran aktif penulis untuk membaca literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti.

6. Metode analisa data

Data yang penulis peroleh melalui teknik kuisisioner kemudian dikualifikasikan sesuai dengan kelompoknya kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk tabel. Data atau informasi yang diperoleh melalui teknik wawancara selanjutnya dikumpulkan, diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat. Kemudian kedua data tersebut dianalisis Secara kualitatif dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan, teori, pandangan para ahli serta data lainnya yang keseluruhannya relevan dengan penelitian dan disajikan secara deskriptif.

7. Metode penulisan

Setelah data-data yang berhubungan dengan penulisan dapat dikumpulkan maka penulis menyusun data tersebut dengan metode sebagai berikut :

a. Metode induktif

Metode ini adalah suatu cara penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus, menuju kepada generalisasi atau umum.⁷

b. Metode deskriptif

⁷Sudjarwo MS, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 2001), Cet. ke-7, h. 19.

Metode ini adalah suatu cara yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta-fakta yang ada di lapangan dan mengupayakan penggambaran data secara apa adanya yang dilakukan dengan cermat.⁸

c. Metode kualitatif

Metode ini adalah suatu pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan lapangan dan apa yang dialami responden, akhirnya dicari atau dihubungkan dengan rujukan teorinya.⁹

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat rencana penulisan dalam skripsi nanti dengan demikian akan tergambar sistematika penulisannya mulai dari pendahuluan hingga penutup. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan tinjauan umum lokasi penelitian, meliputi: letak geografis Kecamatan Marpoyan Damai, profil Kecamatan Marpoyan Damai dan kondisi penduduk Marpoyan Damai

BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan teori-teori yang relevan dan mendukung permasalahan yang hendak diteliti antara lain : Tinjauan Umum Terhadap SK Gubernur Riau No

⁸*Ibid*, h. 51.

⁹S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 1988), Cet. ke-1, h. 25.

KPTS. 312/XI/1982, Kewenangan Negara dalam Masalah Tanah dan Ajaran Tentang Pola Hubungan Rakyat dan Penguasa Menurut Islam.

BAB IV PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN SK GUBERNUR RIAU NO. KPTS. 312/XI/1982

Bab ini akan menganalisis permasalahan yang diteliti yakni: *Pertama* Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 terhadap Larangan Mendirikan Bangunan di Areal Pencadangan Tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru. *Kedua*, Kendala Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 terhadap Larangan Mendirikan Bangunan di Areal Pencadangan Tanah Bandara. *Ketiga*, Pandangan Fiqh Siyasah dihubungkan dengan Pelaksanaan Larangan Mendirikan Bangunan di Areal Pencadangan Tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru Berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab yang terakhir dari penelitian yang berisi kesimpulan serta mengajukan beberapa saran.

BAB II TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak geografis Kecamatan Marpoyan Damai

Kecamatan Marpoyan Damai adalah salah satu dari 12 (dua belas) kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru. Kecamatan Marpoyan Damai termasuk kecamatan baru, merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya. Pemekaran itu terjadi pada tahun 2003 melalui Perda Kota Pekanbaru No. 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir. Kecamatan Marpoyan. Berdasarkan Perda No. 03 Tahun 2003 tersebut maka terbentuk beberapa kecamatan baru salah diantaranya adalah Kecamatan Marpoyan Damai.

Letak Kota Pekanbaru antara $101^{\circ} 14' - 101^{\circ} 34'$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 25' - 0^{\circ} 45'$ Lintang Utara. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau, maka ditetapkan luas Wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km,²¹ khusus Kecamatan Marpoyan Damai memiliki luas wilayah 29,74 km,² dimana wilayahnya terbagi atas 5 (lima) kelurahan, yaitu:²

- a. Kelurahan Tangkerang Tengah;
- b. Kelurahan Tangkerang Barat;
- c. Kelurahan Maharatu;
- d. Kelurahan Sidomulyo Timur;
- e. Kelurahan Wonorejo.

¹Pekanbaru dalam Angka Tahun 2008.

²*Ibid.*

Secara geografis Kecamatan Marpoyan Damai berbatasan dengan :³

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Sukajadi dan Payung Sekaki;
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Kampar;
- c. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Tampan;
- d. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Bukit Raya.

Berdasarkan geografis Kecamatan Marpoyan Damai di atas, maka Kecamatan Marpoyan Damai dapat dijadikan pintu masuk dari kabupaten tetangga yakni Kabupaten Kampar yang berbatasan langsung pada sisi Selatan.

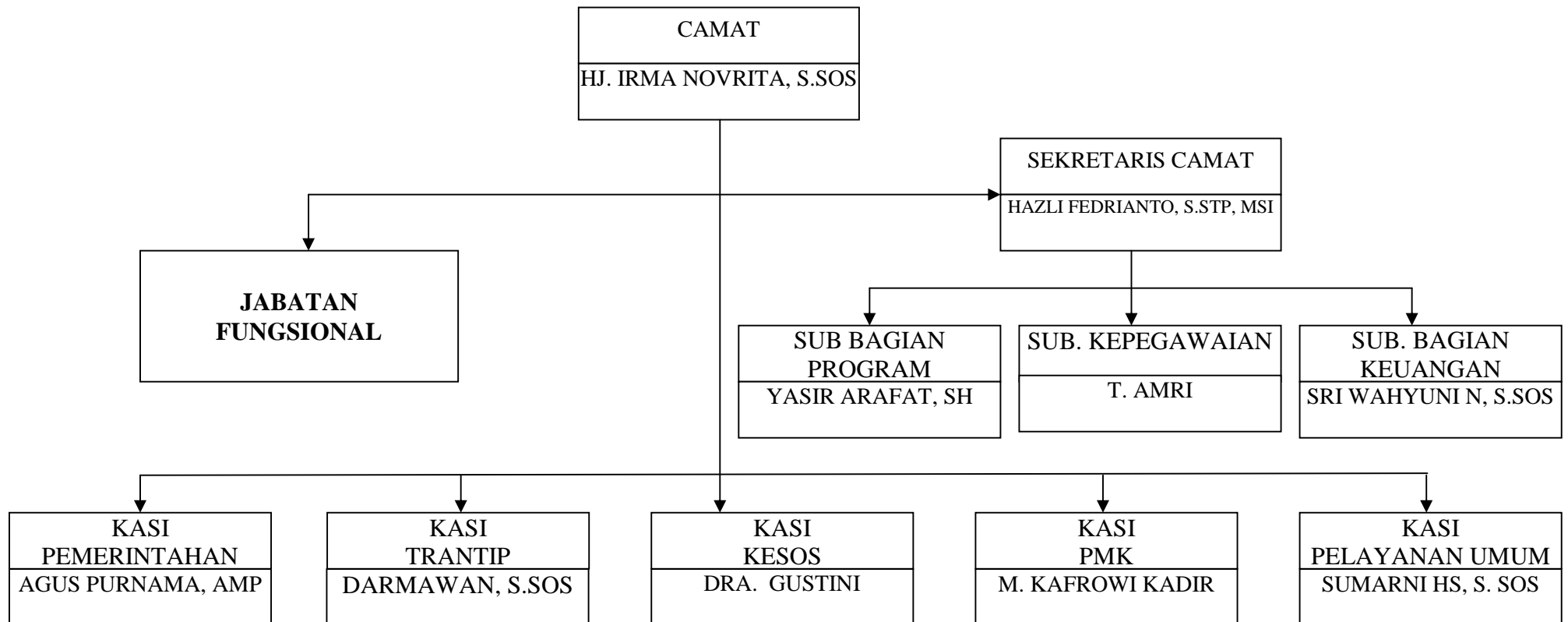
B. Profil Kecamatan Marpoyan Damai

Kecamatan Marpoyan Damai pada saat penelitian ini dilakukan dipimpin oleh Hj. Irma Novrita, S.Sos dibantu dengan seorang sekretaris, sub bagian program, sub bagian kepegawaian dan sub bagian keuangan, juga dibantu oleh beberapa orang kepala seksi (kasi). Kasi tersebut terdiri dari kasi pemerintahan, kasi trantib, kasi ekbang, kasi kesos, dan kasi pelayanan umum. Camat Marpoyan Damai membawahi 5 kelurahan di wilayahnya, dan masing-masing kelurahan dipimpin oleh seorang lurah.

Struktur organisasi Pemerintahan Kecamatan Marpoyan Damai ditentukan berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 16 Tahun 2008. Adapun pengisian jabatan struktur tersebut dapat dilihat pada bagan berikut ini:

³*Ibid.*

**TRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU**



Mengenai tugas pokok dari struktur organisasi Kecamatan Marpoyan Damai di atas, diatur dalam Perda Kota Pekanbaru No. 16 Tahun 2008, dengan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Camat Marpoyan Damai, mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sekretaris Kecamatan, mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan kewenangan Camat dan melaksanakan urusan kesekretariatan yang meliputi surat-menyurat, bidang umum, administrasi kepegawaian dan pengelolaan keuangan, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh aparatur kecamatan.
- c. Sub Bagian Program, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam menyiapkan bahan dan petunjuk teknis dibidang penyusunan program, administrasi umum, surat-menyurat, perlengkapan, sarana dan prasarana kantor, hubungan masyarakat, protokol dokumentasi, kearsipan, kebersihan kantor dan pelaporan dalam lingkup kecamatan.
- d. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, mutasi kepegawaian, pendataan pegawai dan pelaporan di bidang kepegawaian.
- e. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris Kecamatan dalam menyiapkan bahan dan petunjuk teknis dibidang

- penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan, penyusunan anggaran, verifikasi, pertanggung jawaban keuangan, pembayaran gaji pegawai, kesejahteraan pegawai dan pelaporan keuangan dalam lingkup kecamatan.
- f. Kasi Pemerintahan, mempunyai tugas pokok membantu camat menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, serta menyiapkan bahan untuk pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
 - g. Kasi Pelayanan Umum, mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan umum, meliputi administrasi kependudukan, kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan pelayanan administrasi lainnya.
 - h. Kasi Trantib, mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta melaksanakan kegiatan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah kecamatan.
 - i. Kasi Kesos, mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyusunan program, menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olah raga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.
 - j. Kasi PMK, mempunyai tugas pokok membantu Camat menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan, melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan

kelurahan yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan lembaga perekonomian kelurahan serta melaksanakan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.

C. Keadaan penduduk

Penduduk di Kecamatan Marpoyan Damai merupakan salah satu potensi yang harus benar-benar dimanfaatkan untuk keberhasilan program-program pembaangunan. Jumlah penduduk Kecamatan Marpoyan Damai sampai dengan bulan Januari 2010 adalah 119.753 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 31.812. Dari jumlah 119.753 jiwa tersebut terdiri dari 59.495 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 60.258 jiwa penduduk perempuan. Adapun jumlah penduduk Kecamatan Marpoyan Damai berdasarkan jenis kelaminnya dapat dilihat pada Tabel II.1 berikut:

Tabel II. 1
Keadaan Penduduk di Kecamatan Marpoyan Damai Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai Dengan Januari 2010

No.	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tangkerang Barat	9.495	9.594	19.089
2.	Tangkerang Tengah	15.963	16.620	32.583
3.	Sidomulyo Timur	9.948	11.400	21.348
4.	Wonorejo	9.005	7.977	16.982
5.	Maharatu	15.084	14.667	29.751
	Jumlah	59.495	60.258	119.753

Sumber : Kantor Camat Marpoyan Damai Tahun 2010.

Memperhatikan Tabel II.1 di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki. Selanjutnya, kelurahan yang paling banyak penduduknya di Kecamatan Marpoyan Damai adalah di Kelurahan Tangkerang Tengah dengan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 15.963 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 16.620 jiwa. Sedangkan, kelurahan yang paling sedikit di Kecamatan Marpoyan Damai adalah di Kelurahan Wonorejo dengan

jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 9.005 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan sebanyak 7.977 jiwa.

Penduduk di Kecamatan Marpoyan Damai dari mayoritas memeluk agama Islam, secara berurutan disusul dengan Katolik, Protestan, Budha, Hindu dan Konghucu. Mengenai keadaan penduduk di Kecamatan Marpoyan Damai menurut agama selengkapnya dapat dilihat pada Tabel II.2 berikut:

Tabel II. 2
Keadaan Penduduk di Kecamatan Marpoyan Damai Menurut Agama Sampai
Dengan Januari 2010

No.	Kelurahan	A g a m a						Jumlah
		Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha	Kghcu	
1.	T. Barat	12.589	451	5.7333	10	306	0	19.089
2.	T. Tengah	31.074	429	828	12	232	8	32.583
3.	Sid. Timur	18.460	1.061	1.651	140	36	0	21.348
4.	Wonorejo	13.388	1.051	1.580	2	961	0	16.982
5.	Maharatu	27.930	573	1.182	4	62	0	29.751
	Jumlah	103.441	3.565	10.974	168	1.597	8	119.753

Sumber : Kantor Camat Marpoyan Damai Tahun 2010.

Berdasarkan data yang tersaji pada Tabel II.2 di atas, terlihat bahwa jumlah penduduk di Kecamatan Marpoyan Damai mayoritas beragama Islam. Dari jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Marpoyan Damai yakni 119.753 jiwa diantaranya terdapat 3.565 jiwa yang beragama Katolik, 10.974 jiwa yang beragama Protestan, 168 jiwa yang beragama Hindu, 1.597 jiwa yang beragama Budha dan 8 jiwa yang beragama Konghucu.

Selanjutnya, penduduk di Kecamatan Marpoyan Damai berdasarkan tingkat umur yang paling banyak adalah penduduk yang berusia antara 25-29. Selengkapnya mengenai keadaan penduduk di Kecamatan Marpoyan Damai yang

dibedakan berdasarkan jenis kelamin sampai dengan Januari 2010 dapat dilihat pada Tabel II. 3 yang disajikan di bawah ini:

Tabel II.3
Keadaan Penduduk di Kecamatan Marpoyan Damai Berdasarkan Tingkat Umur Sampai Dengan Januari 2010

No.	Golongan Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	4.103	4.349	8.452
2.	5-9	4.435	4.512	8.947
3.	10-14	3.707	3.757	7.464
4.	15-19	4.981	5.053	10.034
5.	20-24	5.557	5.749	11.306
6.	25-29	6.198	6.071	12.269
7.	30-34	5.910	5.609	11.519
8.	35-39	5.237	4.942	10.179
9.	40-44	4.254	4.323	8.577
10.	45-49	4.293	4.466	8.759
11.	50-54	3.324	3.354	6.678
12.	55-59	2.631	2.850	5.481
13.	60-65	1.829	1.941	3.770
14.	66-69	1.299	1.455	2.754
15.	70-74	1.010	1.131	2.141
16.	75 ke atas	714	709	1.257

Sumber : Kantor Camat Marpoyan Damai Tahun 2010.

Memperhatikan data yang tersaji pada Tabel II.3 di atas, terlihat bahwa penduduk yang berusia antara 25-29 adalah tingkat umur yang paling banyak di Kecamatan Marpoyan Damai yakni berjumlah 12.269 jiwa. Sedangkan penduduk yang berusia 75 tahun ke atas adalah tingkat umur yang paling sedikit di Kecamatan Marpoyan Damai.

Selanjutnya, melihat angka kelahiran di Kecamatan Marpoyan Damai pada Januari 2010 yang tertinggi terjadi kelurahan Tangkerang Barat, yakni 64 jiwa anak laki-laki dan 66 jiwa anak perempuan. Selengkapnya keadaan penduduk berdasarkan angka kelahiran di Kecamatan Marpoyan Damai pada Januari 2010 tersebut dapat dilihat pada Tabel II.4 di bawah ini:

Tabel II.4

**Angka Kelahiran Penduduk di Kecamatan Marpoyan Damai pada Bulan
Januri 2010**

No.	Kelurahan	Kelahiran		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Tangkerang Barat	64	66	130
2.	Tangkerang Tengah	20	16	36
3.	Sidomulyo Timur	6	8	14
4.	Wonorejo	9	8	17
5.	Maharatu	0	0	0
	Jumlah	99	98	197

Sumber : Kantor Camat Marpoyan Damai Tahun 2010.

Berdasarkan Tabel II.4 di atas, dapat diketahui bahwa kelahiran pada Januari 2010 angka kelahiran tertinggi terjadi di Kelurahan Tangkerang Barat, yakni sebanyak 64 jiwa anak laki-laki dan 66 jiwa anak perempuan. Sedangkan di Kelurahan Maharatu pada bulan Januari 2010 tidak ada terjadi peristiwa kelahiran.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap SK Gubernur Riau No KPTS. 312/XI/1982

Ketentuan yang menjadikan kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II diberlakukan secara khusus memang tidak ditemukan pada Perda Kota Pekanbaru No. 14 Tahun 2000 tentang Izin Bangunan Dalam Daerah Kota Pekanbaru. Tetapi pada ketentuan lain yakni Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (KDH TK I Riau) No. KPTS. 312/XI/1982 tentang Pencadangan Areal Tanah di Kelurahan Simpang Tiga dan Sidomulyo Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten TK II Kampar untuk Lokasi Pengembangan Pangkalan Udara Pekanbaru, dengan serta merta menjadikan Bandara Sultan Syarif Kasim II diberlakukan menjadi kawasan khusus.

Pemberlakuan secara khusus tersebut adalah berkaitan dengan pencadangan areal di sekitar bandara yang berdasarkan SK Gubernur Riau No. KPTS.312/XI/1982 pada diktum kedua berbunyi “Persil-persil tanah garapan yang terdapat dalam areal tanah tersebut tidak dibenarkan dipindah tangankan, didirikan bangunan dan ditanami dengan sesuatu jenis tanaman, tanpa sepengetahuan dan seizin Camat dan Kelurahan setempat”. Selengkapnya Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS/312/XI/1982 menetapkan sebagai berikut:

Pertama, mencadangkan areal tanah untuk lokasi pengembangan Pangkal Udara (LANUD) Pekanbaru yang terletak disekitar Lapangan Udara Simpang Tiga, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar garis-garis ditetapkan diberi warna kuning, sebagaimana tertera pada peta terlampir dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : dengan jalan Pekanbaru-Teratak Buluh yaitu dari Timbangan LLAJR Simpang Tiga sampai ke simpang Jalan Teratak Buluh, Jalan Kampung (di sebelah Kantor KUA Kecamatan Siak Hulu) menuju Jalan Perumnas.
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Kampung (di sebelah Kantor KUA Kecamatan Siak Hulu) menuju Jalan Perumnas.
- Sebelah Barat : dengan Jalan Perumnas dan Sepanjang 1900 meter dari perpanjangan Jalan Perumnas/Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang.
- Sebelah Utara : 1900 meter ke Utara dari perpanjangan Jalan Perumnas/Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang, ke Timur 700 meter dan selanjutnya menuju Timbangan LLAJR Simpang Tiga.

Kedua, persil-persil tanah garapan yang terdapat dalam areal tanah tersebut tidak dibenarkan dipindah tangankan, didirikan bangunan dan ditanami dengan sesuatu jenis tanaman, tanpa sepengetahuan dan seizin camat dan kelurahan setempat.

Ketiga, pembebasan areal tanah tersebut pada diktum pertama dilaksanakan oleh Departemen Hankam secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan menurut ketentuan serta prosedur yang berlaku.

Keempat, memerintahkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar cq Kepala Kantor Agraria Kabupaten Kampar untuk melakukan pengukuran dan inventarisasi hak-hak rakyat/penduduk yang terdapat dalam areal dimaksud.

Kelima, memerintahkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar untuk melakukan pengamanan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Keenam, Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Memperhatikan ketentuan di atas, ada perintah kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar dari Gubernur KDH TK I Riau agar melakukan pengamanan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam SK KDH TK I Riau Nomor KPTS.312/XI/1982. Oleh karena itu, dengan diterbitkan SK KDH TK I Riau Nomor KPTS.312/XI/1982, praktis tidak dibenarkan mendirikan bangunan yang terletak di areal pencadangan perluasan bandara.

Namun, dalam perkembangannya lokasi yang dahulunya merupakan wilayah Tingkat II Kampar sebagaimana dimaksudkan SK KDH TK I Riau No. KPTS.312/XI/1982, saat ini telah menjadi wilayah dari Kota Pekanbaru. Berkaitan dengan SK KDH TK I Riau tersebut, Walikota Pekanbaru melalui suratnya Nomor 148/PKT-Sebrt/IX/2001, tertanggal 18 April 2001 memerintahkan kepada Camat yang wilayah kerjanya meliputi lokasi yang dimaksud, yakni Camat Tampan dan Bukit Raya untuk tidak melayani/memproses surat menyurat menyangkut masalah tanah, antara lain seperti dipindahtangankan, didirikan bangunan dan lainnya di lokasi tersebut.

Selanjutnya, sejak tahun 2003 dua kecamatan di atas mengalami pemekaran berdasarkan Perda Kota Pekanbaru No. 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kecamatan Payung Sekaki dan Kecamatan Rumbai Pesisir. Dengan demikian muncul beberapa kecamatan baru di antaranya Kecamatan Tampan dan Bukit Raya sebagai kecamatan induk dan Kecamatan Marpoyan Damai, Payung Sekaki dan Tenayan Raya sebagai kecamatan hasil pemekaran.

Keadaannya sekarang khususnya setelah terjadi pemekaran daerah yang dimaksud dalam SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 merupakan wilayah dari kecamatan Marpoyan Damai, sehingga penyebutan untuk wilayah yang dimaksud dalam SK tersebut dalam pembahasan selanjutnya secara *mutatis mutandis* disebut dengan kecamatan Marpoyan Damai.

Memperhatikan diktum pertama Surat Keputusan Gubernur Nomor KPTS 312/XI/1982 di atas yang isinya menetapkan areal tanah untuk lokasi pengembangan pangkal udara dengan menentukan batas-batas yang secara tegas menyebutkan lahan untuk pencadangan areal bandara. Batas-batas yang dimaksudkan dalam diktum pertama tersebut pada saat ini telah mengalami beberapa perubahan seiring dengan terjadinya perkembangan. Dimana batas sebelah Timur dalam SK tersebut terletak dengan Jalan Pekanbaru-Teratak Buluh yaitu dari Timbangan LLAJR Simpang Tiga sampai ke Simpang Jalan Teratak Buluh, Jalan Kampung menuju Jalan Perumnas.

Sekarang Jalan Pekanbaru-Teratak Buluh telah berubah namanya menjadi menjadi Jalan Kaharrudin Nasution, dan Jalan Kampung juga mengalami perubahan menjadi Jalan Kartama, sedangkan Timbangan LLAJR Simpang Tiga sudah tidak ada lagi.

Kalau dilihat dari isi SK Gubernur tersebut, disana disebutkan bahwa batas sebelah Selatan adalah Jalan Kampung menuju Jalan Perumnas. Namun, pada saat sekarang ini, jalan tersebut sudah berganti namanya menjadi Jalan Kartama. Sedangkan sebelah Barat dalam SK tersebut berbatasan dengan Jalan Perumnas sepanjang 1900 meter dari perpanjangan jalan Perumnas/Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang, namun pada saat ini batas sebelah Barat telah mengalami perubahan yang dikarenakan Jalan Perumnas tersebut berubah namanya menjadi Jalan Adi Sucipto. Dan sebelah Utara dalam SK tersebut

sepanjang 1900 meter ke Utara dari perpanjangan Jalan Perumnas/Jalan Raya Pekanbaru Bangkinang, ke Timur 700 meter dan selanjutnya menuju Timbangan LLAJR Simpang Tiga. Saat ini Jalan Perumnas menjadi Jalan Adi Sucipto, dan Timbangan LLAJR Simpang Tiga sudah tidak ada lagi.

B. Kewenangan Negara dalam Masalah Tanah

1. Hak menguasai tanah oleh negara

Hak menguasai tanah oleh negara bersumber dari kekuasaan yang melekat pada negara, sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Ketentuan tersebut menjelaskan dua hal, yaitu bahwa secara konstitusional negara memiliki legitimasi yang kuat untuk menguasai tanah sebagai bagian dari bumi, namun penguasaan tersebut harus dalam kerangka untuk kemakmuran rakyat.

Penjabaran lebih jauh dari hak menguasai tanah oleh negara, terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang menyatakan bahwa "bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat". Hak menguasai dari negara memberi wewenang kepada negara untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;

- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Penguasaan tanah oleh negara dalam konteks di atas adalah penguasaan yang otoritasnya menimbulkan tanggung jawab, yaitu untuk kemakmuran rakyat. Di sisi lain, rakyat juga dapat memiliki hak atas tanah. Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dimiliki orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial yang melekat pada kepemilikan tanah tersebut. Dengan perkataan lain hubungan individu dengan tanah adalah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Sedangkan hubungan negara dengan tanah melahirkan kewenangan dan tanggung jawab.¹

2. Penguasaan tanah oleh negara dan perlindungan terhadap milik perorangan

Otoritas negara dalam penguasaan hak atas tanah bersumber dari Undang-Undang Dasar atau konstitusi Negara. Pengertian yang secara normatif diakui dalam ilmu hukum adalah bahwa masyarakat secara sukarela menyerahkan sebagian dari hak-hak kemerdekaannya untuk diatur oleh negara dan dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk menjaga keteraturan, perlindungan dan kemakmuran rakyat. Negara atau pemerintah harus memiliki *sense of public service*, sedangkan masyarakat harus memiliki *the duty of public obedience*.² Dalam keseimbangan yang demikian, maka tujuan penyerahan sebagian hak-hak masyarakat kepada negara memperoleh legitimasi politik dan legitimasi sosial.

Dalam pembukaan atau mukadimah UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa

¹Aslan Noor, *Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2006), Cet. ke-3, h. 85.

²Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung : PT. Alumni, 2006), Cet. ke-6, h. 9.

Indonesia. Kemudian, dalam Pasal 33 UUD 1945. Hak menguasai tanah oleh negara, dijabarkan dalam bentuk kewenangan tertentu untuk penyelenggaraan hak tersebut. Kewenangan yang diberikan oleh UUPA digolongkan dalam tiga bagian, yaitu pengaturan peruntukan, pengaturan hubungan hukum antara orang dengan bagian-bagian tanah, dan pengaturan hubungan hukum antara orang dan perbuatan hukum.³ Ketiga hal tersebut adalah merupakan intisari dari pengaturan UUPA Pasal 2 ayat (2) yang menyangkut kewenangan yang diturunkan oleh negara kepada pemerintah.

Penggolongan hak menguasai negara pada tanah yang ada pada UUPA adalah meliputi:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah.

Hak-hak yang mengenai pengaturan peruntukan tersebut dijabarkan dalam berbagai produk peraturan dan perundang-undangan lainnya, dalam bidang-bidang seperti :

- 1). Penatagunaan tanah;
- 2). Pengaturan tata ruang;
- 3). Pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah.

Hak-hak yang mengenai pengaturan hubungan hukum tersebut dijabarkan dalam berbagai produk peraturan dan perundang-undangan lainnya, dalam bidang-bidang seperti :

- 1). Pembatasan jumlah bidang dan luas tanah yang boleh dikuasai (*landreform*);

³Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2007), Cet. ke-1, h. 46-47.

- 2). Pengaturan hak pengelolaan tanah.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum atas tanah.

Hak-hak yang mengenai pengaturan hubungan hukum dan perbuatan hukum dijabarkan dalam berbagai produk peraturan dan perundang-undangan lainnya, dalam bidang-bidang seperti :

- 1). Pendaftaran tanah, yaitu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya (Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

- 2). Hak tanggungan

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996, hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah yang meliputi hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan.

Hak tanggungan dapat digolongkan ke dalam hubungan hukum antar orang dan perbuatan hukum atas tanah, karena pada dasarnya hak tanggungan adalah merupakan ikutan (aksesoris) dari suatu perikatan pokok, seperti hubungan hutang piutang yang dijamin pelunasannya dengan hak tanggungan tersebut.

3. Hak milik perorangan atas tanah

Dasar hak untuk kepemilikan individu atas tanah secara umum adalah hak universal yang mengakui kepemilikan atas hak-hak pribadi. Dalam UUD 1945 amandemen kedua pada Pasal 28 G dinyatakan bahwa ”setiap orang berhak atas perlindungan harta benda yang dibawah kekuasaannya”. Sedangkan pada Pasal 28 H ayat (4) dinyatakan bahwa ”setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

Tanah adalah bagian dari hak milik yang dapat dimiliki secara perorangan. Dalam UUPA dijelaskan bahwa sumber kepemilikan hak perorangan itu berasal dari dua unsur, yaitu :

- a. Hak yang timbul karena hak ulayat, yang diperoleh secara hukum adat, turun temurun yang berasal dari pengakuan atau pembukaan hutan oleh masyarakat adat yang belum ada perusahaan sebelumnya;
- b. Hak yang diperoleh oleh orang-orang, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.

Hak-hak yang dapat dimiliki ini berasal atau merupakan derivasi dari hak menguasai tanah oleh negara. Jenis-jenis hak yang demikian adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang sifatnya sementara.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (20) PP No. 24 Tahun 1997, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang

bersangkutan. Dengan kata lain sertifikat bukanlah alas hak, tetapi hanya sekedar bukti hak atas tanah.

4. Pengambilalihan tanah perorangan oleh negara

Atas hak bagi negara untuk mengambliialihan tanah masyarakat, baik yang berasal dari perorangan, kumpulan perorangan atau badan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Sifat yang melekat pada kekuasaan negara dalam penguasaan tanah;
- b. Sifat yang melekat pada kepemilikan tanah yang dimiliki oleh perorangan.

Sifat yang melekat pada kekuasaan negara dalam penguasaan tanah tercermin dari berbagai rumusan undang-undang yang mengatur penggunaan, pemanfaatan dan pengalihfungsian tanah. Pada Pasal 18 UUPA dinyatakan bahwa "untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang".

Sifat yang melekat pada hak milik perorangan atas tanah adalah sekalipun dalam UUPA dinyatakan bahwa hubungan antara bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi, hubungan tersebut harus dimaknai dalam konteks kolektif sebagai bangsa. Hal tersebut antara lain dapat dijelaskan dengan dilarangnya hak milik atas tanah diperoleh oleh warga negara asing secara abadi. Selain itu, hak kepemilikan perseorangan atas tanah dari semula telah dibatasi dengan mendeklarasikan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Fungsi sosial dimaksud adalah dalam menggunakan (atau dalam hal tidak menggunakan) hak-hak atas tanah harus tidak boleh mendatangkan kerugian bagi masyarakat.

Selanjutnya, pada Pasal 18 UUPA dinyatakan bahwa "untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi menurut Pasal 18 UUPA adalah :

- a. Dasar atau alasan atau *reason de'tree* untuk pencabutan hak atas tanah adalah adanya:
 - 1). Kepentingan umum;
 - 2). Kepentingan bangsa dan negara;
 - 3). Kepentingan bersama dari rakyat
- b. Mekanisme atau cara mencabut hak atas tanah harus dengan:
 - 1). Ganti kerugian yang layak;
 - 2). Menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

UUPA tidak menjelaskan siapa atau lembaga mana yang dapat menguji dan menetapkan terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 18 untuk dapat dicabut hak atas tanah. Berdasarkan logika hukum, bahwa yang boleh mencabut hak adalah pihak yang memberikan hak tersebut sebelumnya, dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa hanya negara melalui pemerintahlah yang dapat memaksakan pencabutan hak atas tanah. Pemaksaan atau upaya yang dilakukan oleh pihak di luar pemerintah, seyogianya harus dianggap sebagai inkonstitusional yang bertentangan dengan jaminan perlindungan yang diberikan oleh UUD 1945.

UU No. 20 Tahun 1961 tentang Undang-undang tentang Pencabutan Hak-hak atas Tanah dan Benda benda yang Ada di Atasnya, mengenal dua cara untuk pencabutan hak

atas tanah, yaitu cara yang biasa dan cara untuk keadaan mendesak. Cara biasa diajukan oleh pihak yang berkepentingan secara berjenjang kepada pemerintah, sedangkan cara yang tidak biasa inisiatifnya dapat datang dari pemerintah.⁴

Manusia mempunyai hubungan emosional dan spritual dengan tanah. Tanah tidak dapat semata-mata dipandang hanya sebagai komoditas belaka, tetapi hubungan tanah dengan pemiliknya mengandung nilai-nilai budaya, adat, ekonomis, dan spritual tertentu. Karena itulah, masalah pencabutan hak atas tanah, baik dalam bentuk pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan lainnya harus selalu mempertimbangkan suasana psikologis dari masyarakat atau perorangan yang haknya dicabut. Masalah ganti rugi yang sering menjadi persoalan semestinya tidak semata-mata direduksi hanya untuk penggantian berdasarkan nilai jual objek pajak setempat, tetapi hendaknya mempertimbangkan dampak ikutan dari terserabutnya hak atas tanah tersebut. Menurut A.P Parlindungan, ukuran utama ganti rugi atau kompensasi yang diberikan oleh Pemerintah adalah bahwa seyogianya mereka tidak menjadi lebih miskin dan tidak dapat lagi berusaha setelah tanahnya dibebaskan.⁵

5. Keseimbangan hukum antara penguasaan negara dengan perlindungan terhadap hak milik individu dalam penyelenggaraan hak atas tanah.

Kepentingan pembangunan adalah legitimasi yang paling kuat bagi Pemerintah untuk mengambil alih tanah-tanah perorangan dengan mencabut hak-hak yang sebelumnya melekat pada tanah tersebut. Kepentingan pembangunan dapat dikualifikasikan sebagai kepentingan umum, yang merupakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat secara umum. Dengan kata lain, tersirat makna bahwa

⁴Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), Cet. ke-3, h. 70.

⁵A.P.Parlindungan, *Bunga Rampai Hukum Agraria serta Landreform*, (Bandung : CV Mandar Maju, 1994), Cet. ke-10, h. 92.

kepentingan umum adalah perwujudan dari tugas negara untuk mensejahterakan dan memajukan kepentingan rakyat. Kepentingan umum tidak bermotif komersial. Kepentingan pembangunan harus disesuaikan dan diharmonisasikan dengan konsep penataan wilayah peruntukan, dan tata ruang, serta diberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berimbang mengenai hal tersebut.

Pembebasan tanah untuk kepentingan jalan tol, banjir kanal, waduk bendungan atau pelabuhan udara misalnya tetap saja memperhitungkan manfaat makro yang akan diterima oleh pemerintah sebagai hasil dari pembangunan tersebut. Namun, motivasi utama dalam pembebasan tanah yang muaranya adalah pencabutan hak atas tanah adalah tugas-tugas dan kewajiban pemerintah untuk melaksanakan mandat kepememerintahannya dalam mengabdikan kepada kepentingan publik. Bahwa pada akhirnya ada unsur komersial dalam perhitungan pemerintah untuk pembebasan tanah, unsur tersebut sifatnya adalah pelengkap dan merupakan ikutan dari tujuan atau motif utama untuk kepentingan umum.

Salah satu prinsip dasar yang universal dalam pengambilalihan tanah oleh negara adalah bahwa *“no private property shall be taken for public use without just and fair compensation”*, sehingga dalam proses perolehan tanah tersebut hendaknya dapat memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sehingga tidak merugikan pemilik asal.⁶

Persoalan yang sering dikonotasikan sebagai ketidakadilan dalam pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan antara lain adalah:⁷

⁶Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), Cet. ke-1, h. 227.

⁷*Ibid*, h. 228-229.

- a. Adanya kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta dalam pembebasan tanah. Kerja sama tersebut dapat berupa kerja sama operasi, *build, own, transfer* (BOT), kerja sama pemanfaatan dalam bentuk otorita dan lain-lain. Pemilik asal dapat merasa bahwa kepentingannya dikorbankan untuk kepentingan pihak swasta, sebab tidak dapat dipungkiri dalam logika berusaha, sebagai swasta hanya proyek yang prospektif dan profitabel yang mereka tertarik untuk bekerja sama. Di sisi lain, pemerintah di tengah keterbatasan dana, maupun prioritas dan strategi pembangunan, seringkali bahwa kerjasama kemitraan dengan swasta adalah salah satu upaya untuk dapat melaksanakan dan melanjutkan tugas-tugas pembangunannya.
- b. Adanya peralih fungsian dari tujuan semula pembebasan tanah. Pembebasan tanah yang semula untuk kepentingan umum, dalam perkembangan lebih lanjut dapat melenceng dari tujuan semula. Pembebasan kompleks olah raga Senayan di Ibu Kota Republik Indonesia, Jakarta misalnya adalah sebuah contoh aktual. Pembebasan kawasan tersebut semula dimaksudkan adalah untuk kompleks olah raga yang megah dan representatif di Asia sebagai wujud kebanggaan bangsa dalam mengangkat harkat dan semangat bangsa Indonesia yang baru merdeka dan dalam semangat *nation building*. Dalam perkembangan lanjutannya, sementara masyarakat rela untuk direlokasi dari kawasan tersebut, dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, ketika rezim penguasa berganti, kawasan tersebut telah lebih didominasi oleh sektor swasta, sementara tujuan peruntukan semula tinggal hanya asesories belaka.
- c. Persoalan ganti rugi. Ganti rugi adalah soal yang pelik untuk dipecahkan. Dari sudut formal kepentingan pemerintah ganti rugi lebih banyak diartikan ganti rugi material dengan mengambil patokan berdasarkan harga pasar atau harga yang ditetapkan tersendiri oleh pemerintah, seperti nilai jual objek pajak (NJOP) misalnya. Demikian juga untuk bangunan dan objek lain yang melekat di atasnya, seperti tanaman tumbuh, pemerintah telah punya rumusan dan tabel-tabel untuk mengkonversi nilai pasarnya. Pada hal sesungguhnya, ganti rugi tidak sesederhana itu. Komfortabilitas dengan lingkungan, kedekatan dengan prasarana ekonomi atau lokasi pekerjaan, tingkat polusi, keamanan dan faktor stress karena penyesuaian ke lokasi yang baru, adalah persoalan persoalan besar, yang tidak dapat semata-mata diukur dalam nilai penggantian atas tanah dan bangunan yang melekat di atasnya.

6. Ruang lingkup kepentingan umum

UU No. 21 Tahun 1961 pada Pasal 1 menyatakan sebagai berikut : "Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, sedemikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

Selanjutnya, dalam penjelasan umum dinyatakan bahwa b"iarpun demikian, ketentuan-ketentuan undang-undang ini tidak menutup kemungkinan untuk, sebagai perkecualian, mengadakan pula pencabutan hak guna pelaksanaan usaha-usaha swasta, asal usaha itu benar-benar untuk kepentingan umum dan tidak mungkin diperoleh tanah yang diperlukan melalui persetujuan dengan yang empunya".

Sudah barang tentu usaha swasta tersebut rencananya harus disetujui pemerintah dan sesuai dengan pola pembangunan nasional semesta berencana. Contoh dari pada kepentingan umum itu misalnya pembuatan jalan raya, pelabuhan, bangunan untuk industri dan pertambangan, perumahan dan kesehatan rakyat serta lain-lain usaha dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional semesta berencana. Jika untuk menyelesaikan sesuatu soal pemakaian tanah tanpa hak oleh rakyat pemerintah memandang perlu untuk menguasai sebagian tanah kepunyaan pemiliknya, maka, jika pemilik itu tidak bersedia menyerahkan tanah yang bersangkutan atas dasar musyawarah, soal tersebut dapat pula dianggap sebagai suatu kepentingan umum untuk mana dapat dilakukan pencabutan hak.

Produk perundang-undangan yang demikian terkesan lebih mengutamakan kepentingan negara dan pemodal atau sektor swasta dibandingkan dengan perlindungan kepada pemilik tanah asal.

Pemerintah, seiring dengan tuntutan zaman yang lebih mengedepankan penghormatan kepada hak-hak individual dan persuasi dalam pembebasan tanah, telah mencoba memperbaiki aturan-aturan untuk pembebasan tanah dalam rangka kepentingan pembangunan dengan memberi batasan yang lebih jelas mengenai ruang lingkup kepentingan umum maupun tata cara dan prosedur untuk pembebasan tanahnya.

Berkenaan dengan itu melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 65 tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, telah mencoba melakukan perbaikan antara lain dengan :

- 1). Membatasi pengertian dan ruang lingkup pembangunan untuk kepentingan umum;
- 2). Memberi batasan yang jelas yang membedakan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum, dengan pengadaan tanah selain bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

7. Perubahan penggunaan dari tujuan semula pengambilalihan tanah

Undang-undang tidak memberikan pengaturan maupun penjelasan atas pembebasan tanah yang semula dimaksudkan untuk tujuan pembangunan dalam konteks kepentingan umum, yang kemudian dialihkan dan beralih tujuannya. Dalam konteks demikian, maka yang dapat dijadikan rujukan hanyalah ketentuan-ketentuan umum hukum perdata, seperti Pasal 1338 KUHPerdata yang mengatur tentang asas itikad baik dimana dinyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Menurut Herlien Budiono, di dalam hukum perjanjian adalah penting untuk memegang asas keseimbangan antara kehendak, kepercayaan dan pernyataan.⁸

Asas lainnya yang dapat dimajukan adalah ketentuan pada Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Namun,

⁸Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), Cet. ke-7, 1, h. 411.

patut disadari bahwa penggunaan pasal-pasal tersebut berlaku sangat umum. Sedangkan peralihan atau pencabutan hak atas tanah dianggap telah tuntas apabila para pihak telah sepakat dengan penyelesaiannya misalnya dengan ganti rugi, pemberian tanah pengganti dan lain-lain. Tentu saja apabila suatu perjanjian telah ditunaikan, dalam pengertian pemenuhan prestasi dan kontra prestasi telah dilaksanakan, maka perjanjian tersebut dianggap telah berakhir sehingga sangat muskil untuk menggunakan pasal-pasal di atas sebagai dasar untuk mengajukan gugatan ganti rugi.

C. Ajaran Tentang Pola Hubungan Rakyat dan Penguasa Menurut Islam

Kepemimpinan atau kekuasaan dalam filosofi politik Islam, menurut Ibnu Taimiyyah, merupakan amanat, sewa, atau perwakilan, karena kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat; sehingga para pemimpin merupakan wakil-wakil rakyat itu sendiri yang menduduki posisi salah satu di antara dua pihak yang berpartner dengan yang lain.⁹

1. Pemimpin adalah abdi rakyat

Seorang pemimpin harus memiliki visi kerakyatan dan benar-benar memikirkan kepentingan dan kebutuhan rakyatnya, sebab ada menurut filosofi politik Islam: “*Sayyid al-qaum khâdimuhum*” (Pemimpin adalah pelayan masyarakat). Jika pemimpin mengingkari visi kerakyatan dan menutup mata atas penderitaan rakyat, maka Allah akan membalasnya dengan balasan setimpal. Rasulullah Saw, bersabda:

(قَالَ أَبُو مَرْيَمَ الْأَزْدِيُّ:) دَخَلْتُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مَا أُنْعَمْنَا بِكَ أَبَا فَلَانٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ تَقُولُهَا الْعَرَبُ فَقُلْتُ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ أُخْبِرُكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ

⁹Muhammad al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, diterjemahkan dari judul asli “*Nizham al-Islam: al-Mulk wa ad-Daulah*” oleh Firman Harianto, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), Cet. ke-2, h. 106.

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ وَلَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ
الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقَّرَهُمْ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ
حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقَّرَهُ قَالَ فَجَعَلَ رَجُلًا عَلَى حَوَائِجِ النَّاسِ

Artinya :

“(Abu Maryam al-Azdi bercerita:) “Aku pernah menemui Mu’awiyah, lalu ia berkata, “Alangkah indahnya kedatanganmu bagi kami, wahai Abu Fulan. Cukup (kau berikan) sepatah kata yang biasa diucapkan bangsa Arab.” Aku pun mengutip sebuah Hadits yang pernah aku dengar, “Aku beritahukan kepadamu Hadits yang pernah aku dengar dari Rasulullah Saw, Beliau bersabda, “Barangsiapa diberi kekuasaan oleh Allah untuk mengurus apa pun urusan kaum muslimin, lalu ia menutup diri tanpa mempedulikan kebutuhan mereka, kepapaan mereka, dan kemiskinan mereka, maka Allah akan menutup diri tanpa mempedulikan kebutuhannya, kepapaannya, dan kefakirannya.” Ia menukas, sejak itu ia (Mu’awiyah) menunjukkan seseorang untuk menangani secara khusus masalah kebutuhan rakyat (atau dalam bahasa sekarang bisa disebut Menkokesra)”¹⁰.

2. Tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat

Seorang pemimpin atau pemerintah sebagai lembaga bertanggung jawab penuh untuk menyejahterakan rakyatnya. Jika ada rakyat yang hidup menderita dan serba kekurangan, bahkan mati dalam kondisi menanggung hutang, sementara keluarganya tidak mampu membayarnya, maka negara dengan institusi keuangannya, musti memberikan bantuan dan santunan, bahkan mengambil alih hutang tersebut sebagai tanggung jawabnya. Sikap pro-rakyat ini ditunjukkan oleh Rasulullah Saw, sebagai kepala negara dalam Hadits berikut:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا
أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِأَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا
ضِيَاعًا فَلِيَ وَعَلَيَّ

¹⁰Abu Dawud, Sulaiman ibn al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abî Dâwud*, tahqiq Muhammad Muhyiddin 'Abd al-Hamid, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), II:150, Hadits No. 2948, Bab FI *ma yulzimu al-imam min amr ar-ra'iyah wa al-hajabah 'alaihim* dikutip dari Kamran As'ad Irsyady, *Ajaran-Ajaran Politik dalam Sunan Abî Dâwud dan an-Nasâ'I*, (Sekarsuli, 2009), h. 20.

Artinya:

“Dari Jabir ibnu Abdullah, ia berkata: Rasulullah Saw, bersabda, “Aku lebih berhak (peduli) terhadap kaum mukminin daripada diri mereka. Barangsiapa (rakyat yang meninggal) yang meninggalkan harta (warisan), maka itu untuk keluarganya, dan barangsiapa yang meninggalkan hutang atau anak-anak yang masih kecil, maka serahkanlah urusannya kepadaku dan akulah yang menanggungnya”.¹¹

Hadits lainnya :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلَوَرَّتْهُ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَلَيْنَا

Artinya :

“Dari Abu Hurairah ra., ia berkata: Rasulullah Saw, bersabda, “Barangsiapa (wafat dengan) meninggalkan kekayaan, maka itu bagi ahli warisnya, dan barangsiapa (wafat dengan) meninggalkan beban tanggungan (ekonomi), maka serahkanlah urusannya pada kami”.¹²

3. Kewajiban patuh kepada pemimpin

Sebagai timbal baliknya, rakyat harus tunduk dan patuh kepada pemimpin, meskipun sebelumnya ia adalah seorang budak negro.

عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ جَدِّي يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَلَوْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ يَفُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا

Artinya:

“Dari Yahya ibnu Hushain, ia berkata: Aku mendengar nenekku, ia berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah Saw, bersabda sewaktu haji wada’: “Andai kalian diperintah oleh seorang budak Habsyi (berkulit hitam legam) yang memimpin kalian dengan (berpatokan) Kitab Allah, maka dengar dan taatilah dia”.¹³

¹¹*Ibid*, h. 21.

¹²*Ibid*.

¹³An-Nasa’i, An-Nasa’i; Ahmad ibnu Syu’aib Abu ‘Abdurrahman an-, *Sunan an-Nasâ’i*, tahqiq Abdul Fattah Abu Ghaddah, (Aleppo: Maktab al-Mathbu’at al-Islamiyyah, 1406 H/1986 M), VII:154, Haditst No. 4192, Bab Al-Hadh ‘ala tha’ah al-imam; Hadits ini dinyatakan shahih oleh al-Albani dikutip dari *Ibid*, h. 23.

4. Ketaatan kepada pemimpin adalah cermin ketaatan beragama

Kepatuhan terhadap pemimpin bahkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagamaan seorang muslim, karena berimplikasi pada nilai ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya.

عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

Artinya :

“Dari Ibnu Juraij, bahwasanya Ziyad ibnu Sa’ad memberitahunya bahwa Ibnu Syihab memberitahunya bahwa Abu Salamah memberitahunya bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw,. bersabda: “Barangsiapa menaatiku, maka ia telah menaati Allah, dan barangsiapa membangkang kepadaku, maka ia telah membangkang kepada Allah. Barangsiapa menaati amirku, maka ia telah menaatiku, dan barangsiapa membangkang pada amirku, maka ia telah membangkang kepadaku”.¹⁴

5. Kepatuhan pemimpin harus berkoridor agama dan akal

Meski demikian, kepatuhan ini bukanlah kepatuhan membabi-butakan tanpa melihat apa yang diperintahkan dan bagaimana kondisi sang pemimpin, akan tetapi kepatuhan terhadap pemimpin dalam Islam lebih merupakan kepatuhan rasional yang mengacu pada akal sehat dan ketentuan agama. Dengan bahasa lain, rakyat atau bawahan wajib patuh selama sang pemimpin berada di jalur yang benar, lalu apa yang diperintahkannya masih dalam koridor agama, dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sang pemimpin tidak layak lagi dipatuhi. Sebagaimana Hadits Rasulullah :

¹⁴ *Ibid.*

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا فَقَالَ ادْخُلُوهَا فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ الْآخَرُونَ إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكِّرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ الْآخَرِينَ خَيْرًا وَقَالَ أَبُو مُوسَى فِي حَدِيثِهِ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

Artinya:

“Dari Ali, bahwasanya Rasulullah Saw, mengutus pasukan dan menunjuk seseorang sebagai komandan. Si komandan menyalakan api, lantas berkata, “Masuklah kalian ke dalamnya (api).” Beberapa orang ingin memasukinya, sementara yang lain berkata, “Kami menghindar saja darinya.” Mereka lantas melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah Saw,. Beliau pun bersabda pada orang-orang yang ingin masuk ke dalam api, “Andai kalian memasukinya, maka kalian tetap akan di dalamnya hingga hari kiamat.” Sementara kepada yang lain, beliau berujar, “Bagus!” Mengomentari Hadits ini, Abu Musa menyebutkan sebuah perkataan yang cukup bagus, ia berkata: “Tidak ada kepatuhan (kepada pemimpin) dalam masalah maksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan hanya berlaku dalam masalah kebajikan”.¹⁵

Hadits lainnya:

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَرْءِ
الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ
بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

Artinya :

“Dari Ibnu ‘Umar, ia berkata: Rasulullah Saw, bersabda, “Seorang insan muslim musti taat dan patuh (kepada pemimpin) dalam hal-hal yang ia suka maupun yang ia benci, kecuali jika ia diperintah bermaksiat. Jika ia diperintah bermaksiat, maka tidak ada kewajiban taat dan patuh”.¹⁶

6. Kebebasan ekspresi dan kritik konstruktif terhadap pemimpin

¹⁵ *Ibid*, h. 24.

¹⁶ *Ibid*

Selain itu, seorang pemimpin menurut Rasulullah Saw, juga bukanlah sosok yang antikritik, akan tetapi rakyat diberi kebebasan berpolitik untuk menyuarakan pendapat dan mengeritik penguasa jika memang ia telah melenceng dari alur agama dan perundang-undangan.

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الدِّينُ
؛ قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ
سَلَمِينَ وَعَامَّتِهِمْ

Artinya:

“Dari Tamim ad-Dari, ia berkata: Rasulullah Saw, bersabda: “Sesungguhnya agama adalah nasihat.” Para shahabat bertanya, “Bagi siapa, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Bagi Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan kalangan jelata mereka”.¹⁷

Hadits lainnya:

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ
وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْعَرَزِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ كَلِمَةٌ حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ

Artinya:

“Dari Thariq ibnu Syihab, bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya pada Nabi Saw, sambil meletakkan kakinya di dalam pelana onta (siap berangkat perang), “Jihad apa yang paling afdhol?” Beliau menjawab, “Berkata benar di hadapan penguasa yang lalim (otoriter)”.¹⁸

Bahkan, jika pemimpin yang lalim dan bertindak semena-mena dibiarkan saja tanpa dinasihati, bahkan malah dibenarkan segala sepak terjangnya dan disokong segala

¹⁷ *Ibid*, h. 25.

¹⁸ *Ibid*.

manuvernya, maka Rasulullah Saw, menyatakan “cerai” dengannya dan tidak akan mengizinkannya menemani beliau di surga.

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ مِنْ صَدَقْتَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ
عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضُ وَمَنْ لَمْ
يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ

Artinya :

“Dari Ka’ab ibnu ‘Ujrah, ia bercerita: Rasulullah Saw, keluar menemui kami yang berjumlah sembilan orang, lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya akan datang kelak setelahku para pemimpin (amir) yang barangsiapa membenarkan mereka dengan segala kebohongan mereka dan membantu mereka melakukan kezaliman, maka ia bukanlah bagian dariku dan aku bukan bagian darinya, dan ia tidak akan mendatangkiku di Telaga (Surga). (Sebaliknya), barangsiapa yang tidak membenarkannya dengan segala kebohongannya dan tidak membantu mereka dalam kezaliman mereka, maka ia adalah dariku dan aku adalah bagian darinya, dan ia akan mendatangkiku di Telaga (Surga)”.¹⁹

¹⁹*Ibid*, h.26.

BAB IV
PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN SURAT
KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU NO. KPTS 312/XI/1982

A. Pelaksanaan SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982

Sebagaimana telah disinggung pada bab terdahulu bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982 tentang Pencadangan Areal Tanah di Kelurahan Simpang Tiga dan Sidomulyo Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten TK II Kampar untuk Lokasi Pengembangan Pangkalan Udara Pekanbaru, maka tidak dibenarkan mendirikan bangunan, memindahtangankan tanah bahkan ditanami sesuatu jenis tanaman tanpa seizin camat dan kelurahan setempat. Menindaklanjuti SK Gubernur Riau tersebut, bahkan Walikota Pekanbaru melalui suratnya No. 148/PKT-Sebrt/XI/2001, tertanggal 18 April 2001 juga telah memerintahkan kepada camat yang wilayah kerjanya meliputi lokasi yang dimaksud, yakni Camat Tampan dan Bukit Raya untuk tidak melayani/memproses surat menyurat menyangkut masalah tanah, antara lain seperti dipindahtangankan, didirikan bangunan dan lainnya di lokasi tersebut. Sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka lokasi yang dimaksud dalam SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 sekarang telah menjadi wilayah dari Kecamatan Marpoyan Damai.

Akibat dari lajunya pembangunan pemukiman baru masyarakat di Kota Pekanbaru, khususnya yang mengarah ke lokasi di sekitar Bandara Sultan Syarif Kasim II juga menunjukkan suatu fenomena bahwa sudah banyak pemukiman masyarakat yang didirikan berada dalam areal pencadangan perluasan bandara tersebut. Dalam pengamatan langsung penulis terhadap lokasi tersebut tampak adanya pelanggaran terhadap SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982 terutama sudah banyak bangunan yang berdiri di dalam lokasi sebagaimana dimaksud di dalam SK Gubernur Riau tersebut, seperti di sepanjang Jalan

Kartama, Jalan Pahlawan Kerja, di sisi kiri Jalan Arifin Ahmad, bahkan di Jalan Adi Sucipto yang berada paling dekat dengan lokasi bandara. Keadaan tersebut menandakan pelaksanaan terhadap larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Hasil pengamatan penulis tersebut selanjutnya dibenarkan oleh pihak Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Kepala Bidang Bangunan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Pengawasan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, Camat Marpoyan Damai serta Lurah Maharatu berdasarkan hasil wawancara penulis dalam rangka menguji kebenaran hasil pengamatan tersebut.

Lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap pejabat Pemerintah Kota Pekanbaru tersebut dapat diketahui pelaksanaan terhadap larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru pada intinya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Camat Marpoyan Damai, meskipun Walikota Pekanbaru melalui suratnya No. 148/PKT-Sebrt/IX/2001, tertanggal 18 April 2001 yang memerintahkan kepada camat yang wilayah kerjanya meliputi lokasi yang dimaksud dalam SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982, namun instansinya tidak tetap bisa melarang masyarakat untuk mendirikan bangunan di dalam areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II tersebut. Hal tersebut karena untuk menegakkan pelarangan tersebut harus ada kepastian dari pemerintah, apakah SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982 tersebut dapat ditindaklanjuti dengan proses pembebasan lahan. Namun pembebasan lahan tersebut sampai ini tidak ada kejelasannya. Sungguh tidak adil pemerintah membuat larangan untuk mendirikan bangunan

di dalam areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II tersebut, akan tetapi tidak ada kepastian ganti rugi tanah.¹

Tidak berbeda dengan keterangan di atas, Lurah Maharatu juga memberikan keterangan yang sama, dimana instansinya juga bisa melarang masyarakat untuk mendirikan bangunan di dalam areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II tersebut. Hal ini karena SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982 tidak ada kejelasannya kapan proses pembebasan lahan akan dilaksanakan.²

Selanjutnya, menurut Kepala Bidang Bangunan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, mengemukakan bahwa pelaksanaan terhadap larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru berdasarkan SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982 memang tidak berjalan sebagaimana ditentukan. Keadaan tersebut justru datang dari pemerintahnya karena tidak bisa memberikan kepastian pembebasan lahan sebagai tindak lanjut dari SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982. Ketidakpastian inilah yang menyebabkan tidak berjalannya pelaksanaan terhadap larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru berdasarkan SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982. Selain ketidakpastian tersebut diyakini belum tidak ada kendala lainnya. Misalnya menempatkan masyarakat sebagai salah satu penyebab tidak berjalannya pelaksanaan terhadap larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru berdasarkan SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982 adalah terlalu prematur. Sebab SK Gubernur Riau tersebut belum pernah ditindaklanjuti atau dilaksanakan sampai saat ini, akibatnya tentu tidak bisa diketahui

¹ Irma Novrita (Camat Marpoyan Damai), *Wawancara*, Rabu tanggal 10 Maret 2010.

² Yulizar (Lurah Maharatu), *Wawancara*, Rabu tanggal 17 Maret 2010.

bagaimana respon masyarakat terhadap SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 apakah mayoritas keberatan atau menolak untuk dibebaskan tanahnya guna perluasan bandara. Dengan demikian tidak ada faktor lainnya sampai saat ini selain dari tidak adanya kepastian pembebasan lahan sebagai tindak lanjut dari SK Gubernur Riau No. KPTS312/XI/1982.³

Melengkapi informasi dari Camat Marpoyan Damai dan Kepala Bidang Bangunan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, selanjutnya Kepala Bidang Pengawasan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru menambahkan bahwa tidak berjalannya pelaksanaan terhadap larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru berdasarkan SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 tidak datang dari masyarakatnya, akan tetapi tidak ada kejelasan dari pemerintah kapan pembebasan lahan dapat dilaksanakan. Bidang Pengawasan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru tidak akan mengalami kendala untuk menertibkan bangunan yang melanggar aturan sepanjang aturan tersebut konsisten untuk ditegakkan. Sementara khusus untuk SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 yang menjadi dasar hukum bagi larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru adalah aturan yang tidak konsisten.⁴

Lebih lanjut menurut Kepala Bidang Pengawasan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru sasaran yang akan dicapai dalam peraturan perundang-undangan biasanya adalah kepastian hukum. Kepastian hukum akan tercapai apabila suatu peraturan dirumuskan secara jelas dan dapat menjadi padanan untuk pelaksanaan, dan peraturan yang ada akan

³ Zulfikar (Kepala Bidang Bangunan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru), *Wawancara*, Selasa tanggal 23 Maret 2010.

⁴ Yunizar (Kepala Bidang Pengawasan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru), *Wawancara*, Kamis tanggal 25 Maret 2010.

dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten sehingga tidak menimbulkan polemik dalam penerapan.⁵

Selanjutnya untuk melengkapi informasi dari Camat Marpoyan Damai, Kepala Bidang Bangunan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru serta Kepala Bidang Pengawasan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru berikut ini penulis tampilkan respon Ketua RW dan Ketua RT di Kelurahan Maharatu tentang pelaksanaan terhadap larangan mendirikan

bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 sebagaimana tertera pada Tabel IV.1 berikut:

Tabel IV.1
Bagaimana Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982

Tanggapan Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
a. Tidak Berjalan	67	100 %
b. Berjalan	0	0 %
Jumlah	67	100 %

Sumber : data primer diolah tahun 2010.

Berdasarkan Tabel IV.1 di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan terhadap larangan mendirikan bangunan tersebut tidak berjalan, sebagaimana 67 orang atau 100% memilih jawaban “Tidak Berjalan”. Dengan demikian tanggapan Ketua RW dan Ketua RT dan masyarakat di Kelurahan Maharatu tersebut sejalan dengan informasi yang diperoleh dari Kepala Bidang Bangunan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, Kepala

⁵*Ibid.*

Bidang Pengawasan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dan Camat Marpoyan Damai, yang pada intinya pelaksanaan terhadap larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru berdasarkan SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982 tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat apakah setuju adanya kepastian terhadap SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 sebagaimana tertera pada Tabel IV.2 berikut:

Tabel IV.2
Apakah Setuju Adanya Kepastian Terhadap SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982

Tanggapan Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
a. Setuju	67	100 %
b. Tidak Setuju	0	0 %
Jumlah	67	100 %

Sumber : data primer diolah tahun 2010.

Berdasarkan Tabel IV.2 di atas, seluruh responden berpendapat harus ada kepastian apakah SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982 dilaksanakan atau tidak, sebagaimana seluruh responden memilih jawaban setuju yakni 67 atau 100%. Dengan demikian tanggapan masyarakat tersebut sejalan dengan informasi yang diperoleh dari Kepala Bidang Bangunan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Pengawasan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dan Camat Marpoyan Damai, yang mengemukakan bahwa tidak adanya kepastian pelaksanaan dari SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982 menjadi penyebab pelaksanaan larangan mendirikan bangunan di areal tersebut menjadi tidak berjalan.

Berkenaan dengan kepastian hukum itu menurut Sudikno Mertokusumo “masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. Tetapi jika terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, dan ketat menaati peraturan hukum maka akibatnya akan kaku serta akan menimbulkan rasa tidak adil. Apa pun yang terjadi peraturannya tetap seperti demikian, sehingga harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat, *lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya)”.⁶

Alasan dibutuhkannya kepastian hukum dalam nuansa lain dikemukakan oleh Paul Scholten “hal yang mencolok adalah bahwa ketidakpastian selalu dapat dirasakan, juga dalam pranata-pranata yang diciptakan demi kepastian. Sebab, manusia tidak dapat menanggung ketidakpastian. Ia menghendaki hukum itu ajeg dan pasti, jiwa manusia di mana pun sehubungan dengan itu menempuh jalan yang sama, ia menciptakan pranata-pranata yang sebelum kejadian menyatakan apa yang akan menjadi hukumnya, tentu saja *in abkstrakto*,... Keseluruhan hukum positif adalah perjuangan melawan ketidakpastian. Tetapi ketidakpastian hukum tidak pernah dapat sepenuhnya ditiadakan”.

Menurut ahli lainnya bahwa ketidakpastian hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Kadang-kadang kebijakan atau peraturan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, atau yang dibuat tidak mengindahkan peraturan atau tidak mencabut peraturan sebelumnya untuk aspek yang sama. Terkadang juga peraturan dibuat surut, proses

⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), Cet. ke-1, Edisi ke II, h. 136.

pengambilan keputusan pejabat negara tidak konsisten dan tidak transparan.⁷ Selain itu, ketidakpastian hukum dapat terjadi pula dengan terlalu cepatnya perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, adanya pertentangan di antara berbagai peraturan perundang-undangan, dan kekosongan hukum, bahkan ketidakpastian hukum dapat terjadi pula dalam penegakan hukum.⁸

Relevan dengan pendapat-pendapat ahli di atas, maka karena tidak ada kepastian hukum tentu pelaksanaan terhadap larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru berdasarkan SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 tidak dapat berjalan. Hal ini juga relevan dengan informasi yang didapat dari responden-responden dalam penelitian ini.

Penulis dapat menambahkan bahwa setiap tindakan pemerintahan seperti larangan mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982 harus dapat dipertanggung jawabkan secara hukum maupun secara moral.

Tanggung jawab secara hukum tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal (batas atas). Tanggung jawab secara hukum, maka Gubernur Riau yang mengeluarkan SK tersebut harus berdasarkan kewenangan yang diberikan hukum kepadanya. Kewenangan secara hukum gubernur tersebut dibatasi oleh isi/materi, wilayah dan waktu. Cacat dalam aspek-aspek tersebut menimbulkan cacat kewenangan yang menyangkut baik cacat isi, cacat wilayah dan cacat waktu. Penulis memandang SK Gubernur Riau itu cacat dari segi waktu tidak karena tidak ada jangka waktu. Karena jangka waktu suatu keputusan harus ditentukan, antara timbulnya hal-hal yang menyebabkan dibuatnya dan diumumkannya keputusan itu.

⁷Ridwan Khairandy, *Iklim Investasi dan Jaminan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum Respublica, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2006, h. 154.

⁸*Ibid*, h. 152.

Selanjutnya, pertanggungjawaban secara moral meski terlalu abstrak untuk menilainya, tetapi di sinilah letak moral pejabat negara dipertaruhkan. Tanggung jawab secara moral menurut penulis adalah tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan, tidak boleh melanggar hak dan kewajiban warga negara. Penulis berpendapat SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982 secara moral telah melanggar hak warga negara untuk menentukan masa depannya apakah tetap bertahan untuk tinggal dan menjalani kehidupannya di tempat itu, atau mencari tempat yang lain. SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982 yang tidak ada kepastian tersebut juga mengabaikan rasa keadilan masyarakat karena masyarakat dalam posisi tergantung tanpa kepastian apakah bisa menjual tanahnya ataupun bisa mendirikan bangunan, sementara keduanya dilarang akan tetapi ganti rugi tidak jelas sama sekali.

B. Kendala Pelaksanaan SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982.

Banyaknya pemukiman masyarakat yang didirikan di dalam areal pencadangan perluasan bandara sebagaimana dimaksud dalam SK Gubernur Riau No. KPTS.312/XI/1982 tersebut, menunjukkan pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap keputusan pemerintah. Secara *das sollen* pelanggaran terhadap SK Gubernur Riau No. KPTS.312/XI/1982 seharusnya tidak boleh terjadi, karena ketentuan SK Gubernur Riau tersebut belum diubah atau dicabut hingga saat ini, bahkan Walikota Pekanbaru pada tahun 2001 menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat No. 148/PKT-Sebrt/IX/2001.

Berkaitan dengan gejala atau fenomena tersebut dalam pembahasan kali ini, penulis akan mendiskripsikan faktor-faktor penghambat terhadap pelaksanaan larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara berdasarkan SK Gubernur Riau No. KPTS

312/XI/1982 terutama dari hasil wawancara dan hasil kuisioner terhadap responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini termasuk berdasarkan hasil pengamatan sendiri.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa berdasarkan pengamatan langsung penulis terhadap lokasi tersebut tampak adanya pelanggaran terhadap SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982 terutama sudah banyak bangunan yang berdiri di dalam lokasi sebagaimana dimaksud SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982, seperti di sepanjang Jalan Kartama, Jalan Pahlawan Kerja, di sisi kiri Jalan Arifin Ahmad, bahkan di Jalan Adisucipto yang berada paling dekat dengan lokasi bandara.

Hasil pengamatan penulis tersebut selanjutnya telah dibenarkan oleh pihak Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Kepala Bidang Bangunan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Pengawasan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dan Camat Marpoyan Damai berdasarkan hasil wawancara penulis dalam rangka menguji kebenaran hasil pengamatan tersebut.

Kendala pelaksanaan larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah bandara berdasarkan SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 menurut Kepala Bidang Bangunan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru yang tugasnya memang membidangi mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan pelayanan konsultasi perencanaan bangunan untuk kepentingan perizinan, mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam proses pemberian izin berpendapat bahwa karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah mengenai keberadaan SK tersebut.⁹

Melalui sosialisasi tersebut setidaknya memberikan informasi kepada masyarakat bahwa terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam SK Gubernur Riau tersebut adalah dilarang

⁹ Zulfikar (Kepala Bidang Bangunan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru), *Wawancara*, Selasa 2 Maret 2010.

untuk dirikan bangunan. Lebih lanjut menurut Kepala Bidang Bangunan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru tidak adanya sosialisasi dari pemerintah disebabkan tidak ada kejelasan atau kepastian kapan pembebasan untuk perluasan bandara itu dilakukan baik oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat. Sementara SK Gubernur Riau tersebut juga tidak jelas apakah akan dicabut atau tidak. Sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru berada dalam posisi yang dilematis dan tidak percaya diri untuk melakukan mensosialisasikan kepada masyarakat.¹⁰

Selanjutnya melengkapi informasi Kepala Bidang Bangunan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, penulis melakukan wawancara dengan Camat Marpoyan Damai yang sebagian dari wilayah kerjanya berada lokasi sebagaimana dimaksud dalam SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982. Sejalan dengan keterangan Kepala Bidang Bangunan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan di atas, Camat Marpoyan Damai mengatakan bahwa terhadap keberadaan SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 memang tidak pernah melakukan sosialisasikan. Padahal sosialisasi setidaknya dapat mencegah niat masyarakat terutama yang akan membeli tanah sekaligus berniat membangun pemukiman di sekitar lokasi tersebut. Sedangkan masyarakat yang sudah memiliki tanah yang berada di sekitar lokasi setidaknya dapat mengurungkan niatnya mendirikan bangunan.¹¹

Lurah Maharatu, menambahkan karena tidak ada sosialisasi tersebut bahkan ada Ketua RW dan Ketua RT di Kelurahan Maharatu yang tidak mengetahui keberadaan SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982. Kalaupun ada petunjuk keadaannya sangat terbatas, hanya

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Irma Novrita (Camat Marpoyan Damai), *Wawancara*, pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2010.

dijumpai satu plank saja yang tertulis larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan bandara sebagaimana dimaksud dalam SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982¹²

Menambahkan keterangan Kepala Bidang Bangunan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dan Camat Marpoyan Damai, maka Kepala Bidang Pengawasan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru menambahkan di samping tidak adanya sosialisasi yang disebabkan karena tidak jelasnya atau tidak pastinya pembebasan untuk perluasan bandara itu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga tidak bisa tegas melakukan pengawasan sekaligus penertiban. Bila dilakukan penertiban, tentu harus ada kepastian tentang ganti rugi dalam perluasan bandara tersebut. Sementara tentang ganti rugi tersebut, sampai saat ini tidak pernah terdengar untuk ditindaklanjuti. Bagaimana mungkin melarang masyarakat mendirikan bangunan berdasarkan SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 sedangkan tindak lanjut dari SK tersebut tidak ada sampai saat ini. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Pekanbaru membiarkan saja masyarakat mendirikan bangunan tanpa memberikan tindakan.¹³

Sementara yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru hanyalah sebatas tidak menerbitkan IMB bagi masyarakat yang mengajukan permohonan IMB yang bangunannya berada di dalam lokasi sebagaimana SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982. Keadaan ini menjadi dilematis, disatu sisi masyarakat tidak dapat kepastian hukum, sedangkan dari penerbitan IMB Pemerintah Kota Pekanbaru seharusnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pungutan retribusi pemberian IMB. Dengan demikian masyarakat tidak

¹² Yulizar (Lurah Maharatu), *Wawancara*, Rabu tanggal 17 Maret 2010.

¹³ Yunizar (Kepala Bidang Pengawasan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru), *Wawancara*, Kamis tanggal 25 Maret 2010.

dapat dipersalahkan karena tidak mematuhi SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 sampai saat ini.¹⁴

Selanjutnya, setelah mengetahui faktor-faktor penghambat terhadap pelaksanaan larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara berdasarkan SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 dari pandangan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Kepala Bidang Bangunan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Pengawasan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru dan Camat Marpoyan Damai tersebut, maka berikut ini adalah respon masyarakat terhadap faktor-faktor penghambat tersebut melalui kuisioner-kuisioner yang penulis ajukan dan hasilnya dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini:

Tabel IV.3
Apakah Mengetahui Keberadaan SK Gubernur Riau
No. KPTS. 312/XI/1982

Tanggapan Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
a. Tahu	0	0 %
b. Tidak Tahu	67	100 %
Jumlah	67	100 %

Sumber : data primer diolah tahun 2010.

Berdasarkan Tabel IV.3 di atas, dapatlah diketahui tanggapan responden terhadap keberadaan SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982, yakni semua responden memberi tanggapan tidak mengetahui keberadaan SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982. Dengan demikian respon masyarakat tersebut, sejalan dengan informasi yang diperoleh dari Kepala Bidang Bangunan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, Kepala Bidang Pengawasan di Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, Camat Marpoyan Damai

¹⁴*Ibid.*

serta Lurah Mahararu di atas, yakni karena tidak adanya sosialisasi terhadap keberadaan SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982.

Setelah mengetahui bahwa banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982 sebagai akibat dari tidak adanya sosialisasi dari pemerintah melakukan terhadap keberadaan SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982, selanjutnya dapat dilihat respon masyarakat apakah pernah mendapatkan pengawasan ataupun penertiban dari Pemerintah Kota Pekanbaru sehubungan dengan SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982 yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel IV.4 di bawah ini:

Tabel IV.4
Apakah Mendapatkan Pengawasan atau Penertiban dari Pemerintah Kota Pekanbaru
Sehubungan Masih Berlakunya SK Gubernur Riau
No. KPTS. 312/XI/1982

Tanggapan Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
a. Mendapat pengawasan	0	0 %
b. Tidak mendapat pengawasan	67	0 %
Jumlah	67	100 %

Sumber : data primer diolah tahun 2010.

Memperhatikan data yang tersaji pada Tabel IV.4 di atas, seluruh responden semuanya menyatakan tidak pernah mendapatkan pengawasan ataupun penertiban dari Pemerintah Kota Pekanbaru sehubungan masih berlakunya SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982, yakni 67 orang atau 100 % memilih jawaban tidak mendapat pengawasan sedangkan yang memilih jawaban tidak mendapat pengawasan tidak ada sama sekali atau 0%.

Selanjutnya, untuk mengetahui apakah masyarakat keberatan terhadap keberadaan SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982 penulis juga mengajukan kuisioner kepada responden tersebut yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel IV.5 yang disajikan di bawah ini:

Tabel IV.5
Apakah Keberatan Terhadap Keberadaan SK Gubernur Riau
No. KPTS. 312/XI/1982

Tanggapan Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
a. Tidak Keberatan	0	0 %
b. Keberatan	67	0 %
Jumlah	67	100 %

Sumber : data primer diolah tahun 2010.

Berdasarkan Tabel IV.5 di atas, dapat diketahui bahwa dari seluruh responden semuanya menyatakan keberatan terhadap keberadaan SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982. Dengan demikian dapat diartikan umumnya masyarakat keberatan terhadap keberadaan SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982.

Meskipun tanggapan responden semuanya keberatan terhadap keberadaan SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982, selanjutnya perlu diketahui apakah bersedia direlokasi dari lokasi sebagaimana dimaksud dalam SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982 dengan ganti rugi yang patut dimana hasilnya dapat dilihat pada Tabel VI.6 di bawah ini:

Tabel IV.6
Apakah Bersedia direlokasi dari Lokasi Sebagaimana dimaksud dalam SK Gubernur
Riau No. KPTS. 312/XI/1982 dengan Ganti Rugi yang Patut

Tanggapan Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
a. Bersedia	7	10 %
b. Tidak Bersedia	60	90 %
Jumlah	67	100 %

Sumber : data primer diolah tahun 2010.

Memperhatikan Tabel IV.6 di atas, dapat diketahui tanggapan responden, yakni hanya 7 orang atau 10% yang bersedia direlokasi dari lokasi sebagaimana dimaksud dalam SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982 dengan ganti rugi yang patut. Sedangkan yang tidak bersedia justru lebih banyak yakni 60 orang atau 90%. Dengan demikian mayoritas masyarakat tidak bersedia direlokasi dari lokasi sebagaimana dimaksud dalam SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982 meskipun diberikan ganti rugi yang patut.

Sebagaimana diketahui, banyak masyarakat yang telah melanggar SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982 terutama telah mendirikan bangunan yang berada di dalam lokasi sebagaimana dimaksud SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982. Selanjutnya perlu diketahui apakah sebelum mendirikan bangunan telah mengajukan *advis planning* sekaligus permohonan IMB ke Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru meskipun akhirnya ditolak, dimana hasilnya dapat dilihat pada Tabel IV.7 di bawah ini:

Tabel IV.7
Apakah Sebelum Mendirikan Bangunan Telah Mengajukan Advis Planning Sekaligus IMB ke Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Meskipun Akhirnya ditolak

Tanggapan Responden	Jumlah (orang)	Persentase (%)
a. Ada	7	10 %
b. Tidak Ada	60	90 %
Jumlah	67	100 %

Sumber : data primer diolah tahun 2010.

Berdasarkan Tabel IV.7 di atas, dapat diketahui meskipun banyak masyarakat yang telah melanggar SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982 terutama mendirikan bangunan yang berada di dalam lokasi sebagaimana dimaksud SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982, ternyata dari tanggapan responden di atas, ada juga yang mengajukan *advis planning* sekaligus IMB ke Dinas Tata Ruang Bangunan Kota Pekanbaru sebelum mendirikan

bangunan meskipun akhirnya ditolak, sebagaimana tanggapan responden sebanyak 7 orang atau 10%.

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor penghambat terhadap pelaksanaan larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah bandara berdasarkan SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 tidak hanya datang dari masyarakatnya melainkan juga datang dari pemerintahnya sendiri. Dengan demikian terhadap faktor-faktor penghambat terhadap pelaksanaan larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah bandara berdasarkan SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 dapat dilihat dari dua perspektif, yakni dari perspektif pemerintahnya dan perspektif masyarakatnya.

Menurut penulis faktor-faktor penghambat terhadap pelaksanaan larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah bandara berdasarkan SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 pemicunya sebenarnya adalah karena tidak jelasnya pelaksanaan SK Gubernur Riau tersebut khususnya kepastian tentang ganti rugi. Sebagaimana dikemukakan pada analisis sebelumnya bahwa SK Gubernur Riau tersebut cacat dari segi waktu sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru menjadi tidak percaya diri mensosialisasikan keberadaan SK Gubernur tersebut kepada masyarakat. Efek lainnya dari ketidakpastian tersebut tampak dari sikap Pemerintah Kota Pekanbaru yang membiarkan saja masyarakat mendirikan bangunan tanpa memberikan tindakan ataupun pelarangan. Menurut penulis menempatkan masyarakat sebagai salah satu faktor penghambat terhadap pelaksanaan larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah bandara berdasarkan SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 merupakan faktor yang tidak terlalu serius, sebab sesuai peraturan perundang-undangan tanah hak milik masyarakat dapat dicabut demi pembangunan kepentingan umum melalui

prosedur yang telah ditentukan. Artinya pemerintah mempunyai kewenangan yang dijamin oleh hukum untuk mencabut tanah hak milik masyarakat sesuai tata cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Adapun untuk kepentingan umum tersebut Pasal 18 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menegaskan sebagai berikut:”untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang.

Peraturan pelaksanaan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan tanah untuk kepentingan umum diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Perluasan bandara dapat dikategorikan kepentingan umum, hal tersebut dapat diketahui dengan memperhatikan ketentuan Pasal 5 Perpres No. 36 Tahun 2005, yang berbunyi: ”Pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan pemerintah atau pemerintah daerah meliputi:

1. Jalan umum, jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi;
2. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, dan bangunan pengairan lainnya;
3. Rumah sakit umum dan pusat kesehatan masyarakat;
4. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api dan terminal;
5. Peribadatan;
6. Pendidikan atau sekolah;
7. Pasar umum;
8. Fasilitas pemakaman umum;
9. Fasilitas keselamatan umum;
10. Pos dan telekomunikasi;
11. Sarana olah raga;
12. Stasiun penyiaran radio, televisi dan sarana pendukungnya;

13. Kantor pemerintah, pemerintah daerah, perwakilan negara asing, perserikatan bangsa-bangsa, dan atau lembaga-lembaga internasional di bawah naungan perserikatan bangsa-bangsa;
14. Fasilitas Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
15. Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan;
16. Rumah susun sederhana;
17. Tempat pembuangan sampah;
18. Cagar alam dan cagar budaya;
19. Pertamanan;
20. Panti sosial; dan
21. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik.

Memperhatikan ketentuan Pasal 5 huruf d Perpres No. 36 Tahun 2005 tersebut, jelas bahwa perluasan bandara termasuk bagian dari kepentingan umum yang dijamin oleh hukum dapat dilakukan proses ganti rugi. Secara tegas ketentuan UUPA dan Pasal 5 Perpres No. 36 Tahun 2005 pengadaan tanah kepentingan umum jelas harus dilakukan proses ganti rugi.

C. Analisa terhadap keefektifan SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982

Untuk melihat keefektifan sebuah peraturan dan keputusan harus memfokuskan pada beberapa hal yaitu:

2. Pelanggaran terhadap keputusan

SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 yang bertujuan untuk melarang pembangunan, dipindahtangankan lahan serta pemanfaatan lahan untuk pertanian ternyata tidak berjalan dengan baik, hal ini terlihat banyaknya bangunan terhadap areal penambahan lahan bandara. Ini membuktikan bahwa Surat Keputusan Gubernur tersebut tidak berlaku efektif.

3. Penindakan terhadap pelanggaran

Upaya lain untuk melihat efektif atau tidaknya surat keputusan adalah penindakan terhadap pelanggaran, kenyataan dilapangan tidak terlihat penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga pelanggaran terus terjadi. Penindakan terhadap pelanggaran seharusnya dapat diberikan dengan memberikan surat peringatan dan lain sebagainya, namun ini tidak pernah ada.

4. Kegiatan untuk meminimalisir pelanggaran

Faktor lain adalah meminimalisir pelanggaran ini juga tidak berjalan, seharusnya agar efektifnya SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982, pemerintah daerah mampu untuk meminimalisir pelanggaran dengan cepat melakukan ganti rugi terhadap lahan masyarakat yang ada di areal perluasan bandara. Upaya meminimalisir ini adalah yang kongkrit sehingga jelas status hukum dari SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 tersebut.

D. Pandangan Fiqh Siyasah SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982

Larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru berdasarkan SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 adalah salah satu implementasi perintah penguasa setingkat provinsi. Sejarah pemerintahan Islam sudah mengenal pembagian pemerintahan sampai pada tingkat provinsi seperti Ahwaz dan Bahrain, Sijistan, makran dan Karman, Irak, Syam, Palestina, Mesir, Padang Sahara Libya.¹⁵

Gubernur dalam sistem pemerintah di Indonesia adalah wakil dari pemerintah pusat, dalam konteks pemerintahan Islam juga dikenal pembagian lembaga-lembaga pemerintahan seperti itu, sebagaimana dipetakan oleh Imam al-Mawardi, yang dikutip oleh Dhiauddin Rais, seperti kementerian, ke gubernuran, kehakiman, kemiliteran, keuangan, ditambah jawatan-

¹⁵Musyirifah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik : Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), Cet. ke-5, h. 30.

jawatan lain yang menunjang tatakelola pemerintahan di pusat maupun daerah yang dimaksudkan untuk keberlangsungan sebuah negara dan demi kepentingan rakyat.¹⁶

Tugas dan tujuan pemerintahan menurut Al-Baqillani adalah untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan musuh, menenyapkan penindasan, dan menghilangkan keresahan dalam masyarakat, pemeratakan penghasilan negara bagi rakyat, mengatur perjalanan haji dengan baik dan melaksanakan syari'at yang dibebankan kepadanya. Singkatnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum harus sesuai dengan syari'at.¹⁷

Pelaksanaan syari'at tersebut adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan rakyat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Artinya kekuasaan pemerintah adalah alat untuk melaksanakan seperangkat hukum yang disyariatkan oleh Allah dan alat untuk melaksanakan kemashalatan rakyat.¹⁸

Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.312/XI/1982 yang pada intinya adalah untuk perluasan fasilitas umum, yakni Bandara Sultan Syarif Kasim II jika dilihat dari kacamata syariat dapat diterima karena diterbitkan dalam rangka membangun fasilitas umum yang tujuannya adalah kemaslahatan rakyat itu sendiri. Guna membangun fasilitas umum tersebut, maka Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.312/XI/1982 tersebut adalah dalam rangka persiapan untuk itu. Persiapan itu ditandai dengan tidak dibenarkan dipindah tangankan, didirikan bangunan dan ditanami dengan sesuatu jenis tanaman, tanpa sepengetahuan dan seizin camat dan kelurahan setempat terhadap persil-persil tanah yang letaknya berada dalam lokasi yang disebutkan dalam SK tersebut. Konsekuensi dari SK Gubernur Riau No.

¹⁶Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, diterjemahkan dari judul asli *An-Nazhariyyât as-Siyâsiyyah al-Islâmiyyah* oleh Abdul Hayyie al-Kattanie dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 1421 H/2001 M), Cet. ke-4, h. 209-210.

¹⁷Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cet. ke-4, h. 260.

¹⁸*Ibid.*

KPTS.312/XI/1982 maka Pemerintah Kota Pekanbaru sampai saat ini tidak memberikan IMB bagi masyarakat yang akan mendirikan bangunan yang letaknya berada di dalam lokasi sebagaimana dimaksudkan dalam SK Gubernur Riau tersebut. Meskipun tetap ada masyarakat yang mengajukan permohonan *advis planning* sekaligus IMB ke Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru, namun akhirnya tetap ditolak.

Akan tetapi, semenjak terbitnya SK Gubernur Riau No. KPTS.312/XI/1982 yang sampai saat ini sudah 28 tahun lamanya tidak ada kejelasan atau kepastian untuk dilaksanakan proses pembebasan lahan sebagaimana ditentukan dalam SK itu sendiri yakni pada diktum ketiga, yang berbunyi:

“Pembebasan areal tanah tersebut pada diktum pertama dilaksanakan oleh Departemen Hankam secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan menurut ketentuan serta prosedur yang berlaku”.

Ketidakpastian ini, akhirnya menyebabkan pelaksanaan larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru tidak berjalan. Tentu tidak adil jika pemerintah memerintahkan melarang untuk mendirikan bangunan di dalam areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II tersebut, akan tetapi tidak ada kepastian ganti rugi tanah. Akibat dari ketidakpastian tersebut telah berdampak dengan banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi SK Gubernur Riau No. KPTS.312/XI/1982.

Ketidakpastian jelas melanggar rasa keadilan bagi masyarakat, hal ini dalam sistem pemerintah Islam tidak dibenarkan. Menurut Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, pemerintah haruslah bertanggung jawab terhadap keselamatan rakyat dan harus berbuat adil tetap melaksanakan hukum-hukum syari'at dan harus mengikuti hukum-hukum itu dalam

segala tindak-tanduknya serta memelihara amanah dan janji.¹⁹ Ketidakpastian ganti rugi tanah atau pembebasan lahan sebagaimana dimaksudkan SK Gubernur Riau No. KPTS.312/XI/1982 merupakan suatu bentuk tidak konsistennya pemerintah terhadap keputusan atau hukum yang dibuatnya sendiri.

Pemimpin yang menyelenggarakan pemerintahan harus taat aturan, karena menurut Islam kekuasaan merupakan amanat Tuhan sebagai khalifatullah. Karena itu, dalam menjalankan wewenangnya, mesti selalu mengabdikan sepenuh-penuhnya untuk agama, nusa, bangsa, dan rakyat, berbuat adil tanpa ditunggangi kepentingan pribadi maupun kelompok dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana ditegaskan dari Hadist berikut:

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ و

“Dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: “Sesungguhnya imam adalah tameng yang diperisai belakangnya dan dilindungi dengannya; maka jika ia memerintah dengan ketakwaan kepada Allah dan berbuat adil, ia mendapat pahala dengan hal tersebut, sementara jika ia memerintah dengan selain itu, maka ia telah berdosa”.²⁰

Selanjutnya, dalam Hadist lain:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَوْتِيَكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا أَمْنَعُكُمْوهُ إِنْ أَنَا إِلَّا خَازِنٌ أَضْعُ حَيْثُ أَمَرْتُ

“Rasulullah Saw, bersabda: “Aku tidak bisa memberi kalian apa-apa dan aku pun tidak bisa menghalang-halangi kalian dari mendapatkan apa-apa. Aku hanyalah sekedar bendahara, maka aku pun bertindak sesuai yang diperintahkan kepadaku”.²¹

¹⁹Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Islam dan Politik Bernegara*, (Semarang: PT. Pustaka Rezki Putra, 2002), Cet. ke-1, h. 170.

²⁰An-Nasa’i, An-Nasa’i; Ahmad ibnu Syu’aib Abu ‘Abdurrahman an-, *Sunan an-Nasâ’i*, tahqiq Abdul Fattah Abu Ghaddah, (Aleppo: Maktab al-Mathbu’at al-Islamiyyah, 1406 H/1986 M), VII:155, Hadist No. 4196, dalam Kamran As’ad Irsyady, *Ajaran-ajaran...Op.Cit.*, h. 18.

²¹Abu Dawud; Sulaiman ibn al-Asy’ats as-Sijistani, *Sunan Abî Dâwud*, tahqiq Muhammad Muhyiddin ‘Abd al-Hamid, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Hadist No. 2949, dalam *Ibid*.

Berdasarkan Hadist di atas, maka jelaslah pemimpin dalam menjalankan wewenangnya, harus selalu mengabdikan sepenuhnya untuk agama, nusa, bangsa, dan rakyat, berbuat adil tanpa ditunggangi kepentingan pribadi maupun kelompok dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan itu, rakyat dituntut kepatuhan terhadap pemimpin bahkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberagamaan seorang muslim, karena berimplikasi pada nilai ketaatannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana diriwayatkan dalam Hadist berikut ini:

نُ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي مَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

“Dari Ibnu Juraij, bahwasanya Ziyad ibnu Sa’ad memberitahunya bahwa Ibnu Syihab memberitahunya bahwa Abu Salamah memberitahunya bahwa ia pernah mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw, bersabda: “Barangsiapa menaatiku, maka ia telah menaati Allah, dan barangsiapa membangkang kepadaku, maka ia telah membangkang kepada Allah. Barangsiapa menaati amirku, maka ia telah menaatiku, dan barangsiapa membangkang pada amirku, maka ia telah membangkang kepadaku”.²²

Meski demikian, kepatuhan ini bukanlah kepatuhan membabi-butakan tanpa melihat apa yang diperintahkan dan bagaimana kondisi perintah itu, dalam Islam kepatuhan pada pemimpin lebih merupakan kepatuhan rasional yang mengacu pada akal sehat dan ketentuan agama. Dengan bahasa lain, rakyat atau bawahan wajib patuh selama sang pemimpin berada di jalur yang benar, lalu apa yang diperintakkannya masih dalam koridor agama, dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka sang pemimpin tidak layak lagi dipatuhi. Sebagaimana dapat dipetik dari Hadist-hadist berikut:

²²*Ibid*, VII : 154, Hadist No. 4193, dalam *Ibid*, h. 23.

عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَاقُوقًا نَارًا فَقَالَ ادْخُلُوهَا فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ الْآخَرُونَ إِنَّمَا قَرَرْنَا مِنْهَا فَذَكِّرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَزَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْآخَرِينَ خَيْرًا وَقَالَ أَبُو مُوسَى فِي حَدِيثِهِ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا

“Dari Ali, bahwasanya Rasulullah Saw, mengutus pasukan dan menunjuk seseorang sebagai komandan. Si komandan menyalakan api, lantas berkata, “Masuklah kalian ke dalamnya (api).” Beberapa orang ingin memasukinya, sementara yang lain berkata, “Kami menghindar saja darinya.” Mereka lantas melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah saw. Beliau pun bersabda pada orang-orang yang ingin masuk ke dalam api, “Andai kalian memasukinya, maka kalian tetap akan di dalamnya hingga hari kiamat.” Sementara kepada yang lain, beliau berujar, “Bagus!” Mengomentari hadis ini, Abu Musa menyebutkan sebuah perkataan yang cukup bagus, ia berkata: “Tidak ada kepatuhan (kepada pemimpin) dalam masalah maksiat kepada Allah, sesungguhnya ketaatan hanya berlaku dalam masalah kebajikan”.²³

Ketidakpastian ganti rugi tanah atau pembebasan lahan sebagaimana dimaksudkan SK Gubernur Riau No. KPTS.312/XI/1982 merupakan suatu bentuk tidak konsistennya pemerintah terhadap keputusan atau hukum yang dibuatnya sendiri, maka sangat tidak masuk akal masyarakat mematuhi larangan mendirikan bangunan sebagaimana diatur oleh SK Gubernur Riau No. KPTS.312/XI/1982 yang sampai saat ini sudah 28 tahun lamanya, akan tetapi tidak ada tindak lanjutnya dengan pembebasan lahan. Dengan demikian melihat ketentuan Hadits di atas, maka ketidakpatuhan masyarakat dalam pelaksanaan terhadap larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru berdasarkan SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 dapat dibenarkan. Meskipun SK Gubernur Riau No. KPTS.312/XI/1982 diterbitkan guna perluasan fasilitas umum, yakni Bandara Sultan Syarif Kasim II dalam rangka kemaslahatan. Akan tetapi

²³ An-Nasa’i, *Sunan an...Op.Cit.*, VII:159, Hadist No. 4205, dalam *Ibid*, h. 24.

karena tidak ada kepastiannya, maka keputusan tersebut menjadi tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Meskipun masyarakat harus mempunyai rasa cinta terhadap negara (nasionalisme) dan juga pemerintahannya. Tetapi tetap harus ada *sense of belongingness* terhadap negara dan kepala negara sebagai konsekuensi dari konsep demokrasi di Indonesia. Implikasinya adalah, setiap warga negara harus menjaga martabat negara dan kepala negara dan aparat di bawahnya serta menerima program-program pemerintah dengan tulus, selama kebijakan tersebut membawa kemaslahatan dan tidak melanggar hak-hak warga negara terlebih lagi hukum agama.

Sebagai konsekuensi negara demokrasi, dalam rangka kecintaan kepada negara dan kepala negara, masyarakat harus berani mengkritik dan memberikan saran kepada pemerintah. Dalam konteks ini masyarakat harus mampu dan berani menyuarakan kebenaran. Mereka harus berani memberikan peringatan bila kepala negara dan aparat di bawahnya yang melanggar rambu-rambu hukum, berbuat tidak adil, melanggar hak-hak warganya bahkan aturan agama.

Sehubungan dengan kritik warga negara terhadap kepala negara dan aparat di bawahnya, Rasulullah Saw, dalam Haditsnya mengatakan seorang pemimpin menurut bukanlah sosok yang anti kritik, akan tetapi rakyat diberi kebebasan berpolitik untuk menyuarakan pendapat dan mengkritik penguasa jika memang ia telah melenceng dari alur agama dan perundang-undangan.

عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الدِّينُ
نَصِيحَةٌ قَالُوا لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ
مَتِّهِمْ

“Dari Tamim ad-Dari, ia berkata: Rasulullah Saw, bersabda: “Sesungguhnya agama adalah nasihat”. Para shahabat bertanya, “Bagi siapa, wahai Rasulullah?” Beliau menjawab, “Bagi Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan kalangan jelata mereka”.²⁴

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرَزِ أَيَّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ كَلِمَةً حَقٌّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

“Dari Thariq ibnu Syihab, bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya pada Nabi Saw, sambil meletakkan kakinya di dalam pelana onta (siap berangkat perang), “Jihad apa yang paling afdhol?” Beliau menjawab, “Berkata benar di hadapan penguasa yang lalim (otoriter)”.²⁵

Bahkan, jika pemimpin yang lalim dan bertindak semena-mena dibiarkan saja tanpa dinasihati, bahkan malah dibenarkan segala sepak terjangnya dan disokong segala manuvernya, maka Rasulullah Saw, menyatakan “cerai” dengannya dan tidak akan mengizinkannya menemani beliau di surga.

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ فَقَالَ إِنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ مِنْ صَدَقْتَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضُ وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ لَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضُ

“Dari Ka’ab ibnu ‘Ujrah, ia bercerita: Rasulullah Saw, keluar menemui kami yang berjumlah sembilan orang, lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya akan datang kelak setelahku para pemimpin (amir) yang barangsiapa membenarkan mereka dengan segala kebohongan mereka dan membantu mereka melakukan kezaliman, maka ia bukanlah bagian dariku dan aku bukan bagian darinya, dan ia tidak akan mendatangkiku di Telaga (Surga). (Sebaliknya), barangsiapa yang tidak membenarkannya dengan segala kebohongannya dan tidak membantu mereka dalam kezaliman mereka, maka ia adalah dariku dan aku adalah bagian darinya, dan ia akan mendatangkiku di Telaga (Surga)”.²⁶

Oleh karena itu, masyarakat harus berani melakukan kritik secara etis karena menurut Islam kritik tersebut tidak dilarang, karena kepatuhan masyarakat hanya akan tercipta bila

²⁴An-Nasa’i, Hadist No. 4197, 4198, VII:157 dalam *Ibid*, h. 25.

²⁵An-Nasa’i, Hadist No. 4209, dalam *Ibid*.

²⁶An-Nasa’i, Hadist No. 4207, dalam *Ibid*, h. 26.

seorang pemimpin mempunyai keabsahan dan legitimasi yang kuat, termasuk di dalamnya adalah keabsahan dan kepatutan peraturan atau keputusan yang dibuatnya. Hal ini karena rakyat cenderung tidak akan taat kepada pemimpin dan peraturan atau keputusan yang dinilai tidak absah dan tidak patut secara hukum. Berkenaan dengan itu, SK Gubernur Riau sebagaimana dikemukakan pada analisis sebelumnya adalah cacat dari segi waktu dengan demikian merupakan keputusan yang tidak patut secara hukum.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982 terhadap larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru dapat diketahui bahwa tidak berjalan sebagaimana ditentukan. Tidak berjalannya pelaksanaan larangan tersebut diketahui berdasarkan informasi yang diperoleh dari para responden dalam penelitian ini. Di samping itu, penulis juga melihat relevansinya dengan keadaan-keadaan di lapangan. Inti dari tidak berjalannya pelaksanaan larangan tersebut adalah karena tidak ada kejelasan kapan proses pembebasan lahan akan dilaksanakan. Atau dengan kata lain pemerintah belum memberikan kepastian tentang pembebasan lahan tersebut.
2. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 terhadap larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara karena tidak adanya sosialisasi dari pemerintah mengenai keberadaan SK tersebut. Melalui sosialisasi tersebut setidaknya memberikan informasi kepada masyarakat bahwa terhadap lokasi sebagaimana dimaksud dalam SK Gubernur Riau tersebut adalah dilarang untuk dirikan bangunan. Di samping itu, tidak adanya sosialisasi dari pemerintah disebabkan karena tidak ada kejelasan atau kepastian kapan pembebasan untuk perluasan bandara itu dilakukan, baik oleh pemerintah provinsi ataupun pemerintah pusat. Sementara SK Gubernur Riau tersebut juga tidak jelas apakah akan dicabut atau tidak. Sehingga Pemerintah Kota Pekanbaru berada dalam posisi yang dilematis dan tidak percaya diri untuk melakukan mensosialisasikan kepada masyarakat.

3. Pandangan fiqh siyasah dihubungkan dengan larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru berdasarkan Keputusan Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 adalah salah satu implementasi perintah penguasa setingkat provinsi yang semestinya dipatuhi. Keputusan Gubernur Riau No. KPTS.312/XI/1982 yang intinya adalah untuk perluasan fasilitas umum atau perluasan Bandara Sultan Syarif Kasim II dan jika dilihat dari kacamata syariat dapat diterima karena diterbitkan dalam rangka membangun fasilitas yang tujuannya adalah kemaslahatan rakyat. Akan tetapi, larangan mendirikan bangunan semenjak terbitnya SK Gubernur Riau No. KPTS.312/XI/1982 yang sampai saat ini sudah 28 tahun lamanya tidak ada kejelasan atau kepastian untuk dilaksanakan proses pembebasan lahan. Ketidakpastian ini, akhirnya membuat pelaksanaan larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru tidak dapat berjalan. Tentu tidak adil jika pemerintah melarang masyarakat mendirikan bangunan di dalam areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II tersebut, akan tetapi tidak ada kepastian ganti rugi tanah. Akibat dari ketidakpastian tersebut juga berdampak dengan banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi SK Gubernur Riau No. KPTS.312/XI/1982. Ketidakpastian juga melanggar rasa keadilan bagi masyarakat, dimana hal seperti ini dalam sistem pemerintah Islam tidak dibenarkan. Karena menurut Islam, pemerintah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan rakyat dan harus berbuat adil tetap melaksanakan hukum-hukum syari'at dan harus mengikuti hukum-hukum itu dalam segala tindak-tanduknya serta memelihara amanah dan janji. Ketidakpastian ganti rugi tanah atau pembebasan lahan sebagaimana dimaksudkan SK

Gubernur Riau No. KPTS.312/XI/1982 merupakan suatu bentuk tidak konsistennya pemerintah terhadap keputusan atau hukum yang dibuatnya sendiri.

B. Saran

1. Agar pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS. 312/IX/1982 terhadap larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru dapat berjalan, maka sebaiknya Pemerintah Kota Pekanbaru meminta kepastian kepada pemerintah di atasnya.
2. Mengatasi faktor-faktor penghambat pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 terhadap larangan mendirikan bangunan di areal pencadangan tanah Bandara sebaiknya Pemerintah Kota tetap melakukan sosialisasi keberadaan SK tersebut. Di samping itu, tetap berupaya meminta kepastian kepada pemerintah di atasnya atau bila diperlukan mengajukan eksekutif review supaya mendapat kepastian hukum bagaimana kekuatan SK tersebut.
3. Ketidakpastian SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 jelas melanggar rasa keadilan bagi masyarakat, hal ini dalam sistem pemerintah Islam jelas tidak dibenarkan. Maka disarankan kepada masyarakat melakukan perjuangan politik seperti menyampaikan aspirasi ke DPRD atau bila perlu mengajukan judicial review kepada Mahkamah Agung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), Cet.ke-1.
- A.P.Parlindungan, *Bunga Rampai Hukum Agraria serta Landreform*, (Bandung : CV Mandar Maju, 1994), Cet.ke-10.
- Aslan Noor, *Konsepsi Hak Milik Atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, (Bandung : CV Mandar Maju, 2006), Cet.ke-3.
- Boedi Harsono, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2007), Cet.ke-1.
- Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006), Cet.ke-7.
- Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, diterjemahkan dari judul asli *An-Nazhariyyât as-Siyâsiyyah al-Islâmiyyah* oleh Abdul Hayyie al-Kattanie dkk, (Jakarta: Gema Insani Press, 1421 H/2001 M), Cet.ke-4.
- Djuhaendah Hasan, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal*, (Bandung : PT. Citra Aditiya Bakti, 1996), Cet.ke-1.
- Husien Khalid Bahreisj, *Himpunan Hadist Shahih Muslim*, (Surabaya : Al Ikhlas, 1984), Cet.ke-2.
- Kamran As'ad Irsyady, *Ajaran-Ajaran Politik dalam Sunan Abî Dâwud dan an-Nasâ'I*, (Sekarsuli, 2009).
- L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, alih bahasa Oetarid Sadino, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005), Cet.ke-7.
- N.M. Spelt & J.B.J.M. ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Penyunting Philipus Mandiri Hadjon, (Surabaya :Yuridika, 1993), Cet.ke-1.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, (Bandung : PT. Alumni, 2006), Cet.ke-6.

- Muhammad al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, diterjemahkan dari judul asli “*Nizham al-Islam: al-Mulk wa ad-Daulah*” oleh Firman Harianto, (Solo: Pustaka Mantiq, 1995), Cet.ke-2.
- Musyrifah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik : Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), Cet.ke-5.
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru.
- Pekanbaru dalam Angka Tahun 2008.
- Rafi’udin, *Hadist-hadist Pilihan*, (Jakarta : PT. Bina Utama, 2001), Cet.ke-1.
- Ridwan Khairandy, *Iklim Investasi dan Jaminan Kepastian Hukum*, Jurnal Hukum Respublica, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2006.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), Cet.ke-10.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Cet.ke-2.
- Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), Cet.ke-4.
- SK KDH TK I Riau Nomor KPTS.312/XI/1982.
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 1988), Cet.ke-1.
- Sobirin, *Distribusi Pemukiman dan Prasarana Kota (Studi Kasus Dinamika Pembangunan Kota di Indonesia*, Dimensi Keruangan Kota Teori dan Kasus, Penyunting Raldi Hendro Koestoer dkk, (Jakarta : Univ. Indonesia Press, 2001), Cet.ke-5.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta : Liberty, 1988), Cet ke-1.
- Sudjarwo MS, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bandung : Mandar Maju, 2001), Cet.ke-7.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), Cet.ke-3.
- Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Islam dan Politik Bernegara*, (Semarang: PT. Pustaka Rezki Putra, 2002), Cet.ke-1.

Yalid, *Peranan Perencana Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Izin Bangunan dalam Daerah Kota Pekanbaru*, Skripsi, (Pekanbaru : Universitas Lancang Kuning, 2003).

Yudha Bhakti Ardhiwisasta, *Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing*, (Bandung : PT. Alumni, 1999), Cet.ke-1.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Keadaan Populasi dan Sampel..... 11
Tabel II.1	Keadaan Penduduk di Kecamatan Marpoyan Damai Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai Dengan Januari 2010... 22
Tabel II.2	Keadaan Penduduk di Kecamatan Marpoyan Damai Menurut Agama Sampai Dengan Januari 2010..... 23
Tabel II.3	Keadaan Penduduk di Kecamatan Marpoyan Damai Berdasarkan Tingkat Umur Sampai Dengan Januari 2010..... 24
Tabel II.4	Angka Kelahiran Penduduk di Kecamatan Marpoyan Damai pada Bulan Januari 2010..... 25
Tabel IV.1	Bagaimana Pelaksanaan Terhadap Larangan Mendirikan Bangunan di Areal Pencadangan Tanah Bandara Sultan Syarif Kasim II Kota Pekanbaru Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982 58
Tabel IV.2	Apakah Setuju Adanya Kepastian Terhadap SK Gubernur Riau No. KPTS 312/XI/1982..... 59
Tabel IV.3	Apakah Mengetahui Keberadaan SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982..... 67
Tabel IV.4	Apakah Mendapatkan Pengawasan atau Penertiban dari Pemerintah Kota Pekanbaru Sehubungan Masih Berlakunya SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982..... 68
Tabel IV.5	Apakah Keberatan Terhadap Keberadaan SK Gubernur Riau No. KPTS. 312/XI/1982..... 68
Tabel IV.6	Apakah Bersedia direlokasi dari Lokasi Sebagaimana dimaksud dalam SK Gubernur Riau No.KPTS. 312/XI/1982 dengan Ganti Rugi yang Patut..... 69
Tabel IV.7	Apakah Sebelum Mendirikan Bangunan Telah Mengajukan Advis Planning Sekaligus IMB ke Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Meskipun Akhirnya ditolak..... 70

LEMBAR PENELITIAN

NAMA : HENDRI
NIM : 1424025099
JURUSAN : JINAYAH SIYASAH FAK. SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UIN SUSKA

DAFTAR PERTANYAAN KUISIONER

Sampel/Reponden :

No.	Pertanyaan	Jawaban	
1.	Apakah SK Gubernur Riau No. 312/XI/1982 masih relevan untuk dilaksanakan meskipun belum dicabut sampai saat ini?	Setuju	Tidak Setuju
2.	Apakah mendirikan bangunan yang dari ketinggian tidak mengganggu penerbangan tidak masalah didirikan meskipun Berdasarkan SK Gubernur Riau No. 312/XI/1982 dilarang mendirikan bangunan?	Setuju	Tidak setuju
3.	Apakah Bandara Sultan Syarif Qasim II setuju dipindahkan mengingat sudah banyak pemukiman masyarakat?	Setuju	Tidak setuju
4.	Apakah banyak pemukiman masyarakat di sekitar bandara Sultan Syarif Qasim II sudah membahayakan keselamatan?	Setuju	Tidak setuju
5.	Apakah SK Gubernur Riau No. 312/XI/1982 selayak dicabut?	Setuju	Tidak setuju
6.	Apakah ada Pemerintah Kota Pekanbaru mensosialisasikan keberadaan SK Gubernur Riau No. 312/XI/1982?	Ada	Tidak ada
7.	Apakah Keberadaan SK Gubernur Riau No. 312/XI/1982 harus disertai ganti rugi?	Ya	Tidak
8.	Apakah ada ganti rugi tersebut	Ada	Tidak ada

LEMBAR PENELITIAN

NAMA : HENDRI
NIM : 1424025099
JURUSAN : JINAYAH SIYASAH FAK. SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UIN SUSKA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Sampel/Reponden : Kepala Bidang Bangunan Dinas Tata Ruang dan Bangunan

1. Apa saja tugas Bidang Bangunan?
2. Apakah ada masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga yang mengajukan permohonan IMB? Jika ada berapa permohonan yang masuk pada tahun 2008?
3. Apakah syarat yang harus dipenuhi bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonan IMB, lalu bagaimana prosesnya di Dinas Tata Ruang dan Bangunan?
4. Banyak permohonan IMB masyarakat yang ditolak berdasarkan SK Gubernur Riau No. 312/XI/1982? apakah tidak ada kebijakan lain dari Pemerintah Kota Pekanbaru, sedangkan IMB dapat meningkatkan PAD?
5. Apakah ada ganti rugi dilakukan pemerintah sejak terbitnya SK Gubernur No. 312/XI/1982?
6. Jika tidak ada ganti rugi tersebut tentu masyarakat memiliki tanah tidak mendapatkan kepastian, bagaimana menurut bapak ?
7. Bagaimana biasanya respon masyarakat dengan adanya penolakan IMB tersebut sedangkan cukup bangunan yang sudah terlanjur didirikan? Apakah Bidang Bangunan menghadapi kendala dalam hal ini, jika ada bagaimana solusi yang dilakukan?
8. Kepada siapa Bidang Bangunan ini bertanggungjawab?

LEMBAR PENELITIAN

NAMA : HENDRI
NIM : 1424025099
JURUSAN : JINAYAH SIYASAH FAK. SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UIN SUSKA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Sampel/Reponden : Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Bangunan

1. Apa saja tugas Bidang Pengawasan?
2. Banyak permohonan IMB masyarakat yang ditolak berdasarkan SK Gubernur Riau No. 312/XI/1982 dan kenyataannya pula banyak bangunan yang sudah terlanjur berdiri lalu bagaimana tindakan yang dilakukan Bidang Pengawasan ini terhadap hal tersebut?
3. Berkaitan dengan tindakan tersebut ada berapa menurut Bapak masyarakat yang Permohonan IMB-nya ditolak berdasarkan SK Gubernur Riau No. 312/XI/1982 namun tetap mendirikan bangunan?
4. Apakah tindakan yang dilakukan Bidang Pengawasan tersebut sudah efektif menurut Bapak untuk menertibkan bangunan yang dilarang ? Jika belum bagaimana menurut Bapak seharusnya?
5. Apakah kendala yang dihadapi Bidang Pengawasan dalam melakukan tugas pada umumnya?
6. Apakah kendala yang dihadapi khususnya dalam menertibkan bangunan yang terlanjur didirikan sedangkan permohonan IMB berdasarkan SK Gubernur No. 312/XI/1982?
7. Mengingat SK Gubernur Riau No. 312/XI/1982 tentu cukup banyak masyarakat yang mengetahui apakah ada upaya untuk tetap mensoalisasikan?
8. Apa upaya yang dilakukan Bidang Pengawasan dalam mengatasi kendala di atas?
9. Apakah ada koordinasi Bidang Pengawasan dalam menjalankan tugas dengan instansi lainnya khususnya dalam rangka menertibkan bangunan?
10. Bagaimana bentuk koordinasi tersebut?
11. Kepada siapa Bidang Pengawasan ini bertanggungjawab?

LEMBAR PENELITIAN

NAMA : HENDRI
NIM : 1424025099
JURUSAN : JINAYAH SIYASAH FAK. SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UIN SUSKA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Sampel/Reponden : Camat Bukit Raya

1. Mengingat sudah beberapa kali terjadinya pergantian camat di sini, apakah Bapak mengetahui adanya SK Gubernur Riau No. 312/XI/1982 yang masih berlaku seperti di Dinas Tata Ruang dan Bangunan banyak menolak permohonan IMB dengan dasar SK tersebut?
2. Jika Bapak mengetahuinya apakah ada Bapak mensosialisasikannya kepada masyarakat, apalagi jika jual beli tanah?
3. Apakah ada koordinasi dari Dinas Tata Ruang berkaitan dengan permohonan IMB masyarakat asal Bukit Raya?
4. Apa tindakan yang dapat dilakukan Camat berkaitan ada permohonan IMB masyarakat ditolak oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan namun tetap mendirikan bangunan sepanjang ada dikoordinasikan kepada Bapak?
5. Apakah ada kendala yang dihadapi untuk mengambil tindakan tersebut?
6. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

LEMBAR PENELITIAN

NAMA : HENDRI
NIM : 1424025099
JURUSAN : JINAYAH SIYASAH FAK. SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UIN SUSKA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Sampel/Reponden : Lurah Simpang Tiga

1. Mengingat sudah beberapa kali terjadinya pergantian lurah di sini, apakah Bapak mengetahui adanya SK Gubernur Riau No. 312/XI/1982 yang masih berlaku seperti di Dinas Tata Ruang dan Bangunan banyak menolak permohonan IMB dengan dasar SK tersebut?
2. Jika Bapak mengetahuinya apakah ada Bapak mensosialisasikannya kepada masyarakat, apalagi jika jual beli tanah?
3. Apakah ada koordinasi dari instansi lain berkaitan dengan permohonan IMB masyarakat asal Kelurahan Simpang Tiga ?
4. Apa tindakan yang dapat dilakukan Lurah berkaitan ada permohonan IMB masyarakat di Kelurahan Simpang Tiga ditolak oleh Dinas Tata Ruang dan Bangunan namun tetap mendirikan bangunan sepanjang ada dikoordinasikan kepada Bapak?
5. Apakah ada kendala yang dihadapi untuk mengambil tindakan tersebut?
6. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

LEMBAR PENELITIAN

NAMA : HENDRI
NIM : 1424025099
JURUSAN : JINAYAH SIYASAH FAK. SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UIN SUSKA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Sampel/Reponden : Masyarakat yang Mendirikan Bangunan dalam Areal
Pencadangan Tanah Bandara

1. Apakah mengetahui adanya SK Gubernur Riau No. 312/XI/1982 yang masih berlaku yang mempunyai konsekuensi tidak boleh mendirikan bangunan?
2. Jika mengetahui mengapa tetap mendirikan bangunan sementara Pemerintah Kota Pekanbaru tidak memberikan IMB?
3. Apakah Saudara keberatan dengan masih berlakunya SK Gubernur Riau No. 312/XI/1982 yang mempunyai konsekuensi tidak boleh mendirikan bangunan?
4. Jika keberatan mengapa? dan apa sebaiknya menurut Saudara yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru?